



PANDUAN EITI UNTUK LEGISLATOR

Bagaimana Mendukung dan Memperkuat
Transparansi Sumberdaya

Panduan EITI bagi Legislator
Bagaimana Mendukung dan
Memperkuat Transparansi Sumberdaya

Ditulis oleh Alison Paul DeSchryver,
bersama John Johnson, dari National
Democratic Institute (NDI), dengan
komentar dari Matteo Pellegrini dan
Revenue Watch Institute (RWI) serta
Eddie Rich dan Anders Kråkenes dari
Sekretariat Internasional EITI.

ISBN: 978-0-9817665-6-0

© EITI 2009

Pandangan-pandangan yang
diungkapkan dalam publikasi ini
adalah milik para penulis dan para
kontributor.

Tata letak oleh Judit Kovács, Createch
Berdasarkan desain oleh Alison
Beanland



PANDUAN EITI UNTUK LEGISLATOR

Bagaimana Mendukung dan Memperkuat
Transparansi Sumberdaya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	7
RINGKASAN EKSEKUTIF	11
PENDAHULUAN	13
Bab I. Apa Itu EITI?	15
Apa itu EITI?	15
Apa manfaat dari EITI?	16
Siapa yang terlibat dalam EITI?	17
Bagaimana EITI dikelola dan didanai di masing-masing negara?	17
Bagaimana EITI dikelola dan didanai di tingkat internasional?	17
Bagaimana legislator dapat belajar lebih banyak mengenai EITI?	17
Bab II. Lembaga Legislatif dan EITI	19
Bagaimana para legislator dapat berkontribusi pada EITI?	19
Bagaimana legislator bisa mengambil keuntungan dari terlibat dalam EITI?	20
Apa piranti dan strategi legislatif yang bisa digunakan untuk terlibat dalam EITI?	20
Bab III. Bersiap untuk EITI	23
Apa informasi tentang industri ekstraktif yang penting diketahui bagi EITI?	23
Piranti-piranti apa yang terbaik bagi seorang legislator untuk mendapatkan informasi ini?	25
Apa yang dapat dilakukan legislator untuk mendorong pemerintah untuk menandatangani?	26
Bab IV. Membangun Struktur Tatakelola EITI	27
Apa yang harus diketahui legislator tentang struktur tatakelola EITI?	27
Apakah legislator duduk dalam MSG? Apa keuntungan melakukannya?	29
Bagaimana legislator dapat memonitor dengan sebaik-baiknya kegiatan dari MSG?	30
Bab V. Membentuk Program EITI	33
Apa isu-isu utama yang dipertimbangkan dalam sebuah program EITI?	33
Di mana keputusan-keputusan cakupan akan tercermin?	34
Bagaimana legislator memastikan EITI mengikuti rencana kerja yang disepakati?	35
Bab VI. Menganalisis dan Memperbaiki Laporan dan Proses EITI	37
Bagaimana proses pelaporannya berjalan?	37
Seharusnya Seperti Apa Laporan EITI Itu?	38
Apa yang Harus Dilakukan Legislator untuk Mendorong Perbaikan dalam Laporan dan Proses EITI?	39

DAFTAR ISI

Bab VII.	Mengkomunikasikan Laporan EITI	41
	Mengapa komunikasi penting dalam suatu program EITI?	41
	Mengapa hasil-hasil dalam laporan EITI penting dikomunikasikan?	42
	Mengapa legislator harus membantu mengkomunikasikan EITI?	42
	Apa tujuan-tujuan dari membagi hasil-hasil laporan EITI?	42
	Apa pendekatan-pendekatan untuk mengkomunikasikan tentang EITI?	43
Bab VIII.	Memastikan Proses Validasi yang Berhasil	45
	Apa maksud dari proses validasi?	45
	Bagaimana proses validasi berjalan?	45
	Bagaimana legislator dapat mengawasi proses validasi?	46
Bab IX.	Memperkuat Proses EITI	47
	Mengapa penting untuk memperkuat proses EITI?	47
	Bagaimana meloloskan undang-undang EITI dapat membantu membuat programnya lebih berhasil?	47
	Bergerak melampaui inti EITI	48
	Menghubungkan EITI dengan perumusan anggaran dan pengawasan	49
Bab X.	Menjadi Bagian dari Gerakan EITI Dunia	51
	Mengaitkan upaya-upaya dari negara-negara yang menerapkan EITI	51
	Berjejaring dalam organisasi legislatif internasional	52
	Memfaatkan ketertarikan pada EITI untuk mencari dukungan tambahan bagi penguatan legislatif	53
Lampiran		55
	Lampiran A : Prinsip-Prinsip EITI dan Kriteria	55
	Lampiran B : Ringkasan Strategi-Strategi Legislatif	57
	Lampiran C : Daftar Sumber Bacaan Tambahan	60
	Lampiran D : Undang-Undang NEITI	63
	Lampiran E : Peta Arus Keuangan Kamerun	69
	Lampiran F : Glosarium EITI	70
DAFTAR BOX, STUDI KASUS, DIAGRAM, GAMBAR, DAN TABEL		
	Box 1 : “Kutukan Sumberdaya” dan Kemiskinan	13
	Box 2 : Pemangku Kepentingan EITI Pada Umumnya	17
	Box 3 : Menstrukturkan Keterlibatan Legislatif dalam EITI	20
	Box 4 : Memetakan Aliran Keuangan	25
	Box 5 : Sumber-Sumber Potensial untuk Kepakaran EITI	29
	Box 6 : Catatan tentang Pengaturan Waktu EITI	30
	Box 7 : Apa yang Harus Dilakukan bila Data Sebelumnya Belum Diaudit	34
	Box 8 : Memaksimalkan Manfaat dari Arahan EITI	35

Box 9 : Pilihan-Pilihan ketika Pemerintah Tidak Tanggap terhadap Permintaan akan Informasi EITI	35
Box 10 : Pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan ketika meninjau laporan EITI	39
Box 11 : Berkomunikasi secara Online: Beberapa Situs Web EITI Internasional dan Nasional	42
Studi Kasus 1 : Memulihkan Dana di Nigeria	16
Studi Kasus 2 : Kajian EITI di Zambia	26
Studi Kasus 3 : Keanggotaan Legislatif 'MSG'	27
Studi Kasus 4 : Workshop Lintas Pemangku Kepentingan Zambia	28
Studi Kasus 5 : Bergabung dengan 'MSG' EITI	30
Studi Kasus 6 : Membentuk EITI di Mongolia	34
Studi Kasus 7 : Contoh-Contoh Tambahan tentang Materialitas	34
Studi Kasus 8 : Menghadiri sebuah Workshop tentang Laporan EITI di Ghana	37
Studi Kasus 9 : Contoh-Contoh Masalah dalam Suatu Laporan EITI: Mongolia	38
Studi Kasus 10 : <i>Road Show</i> di Nigeria	43
Studi Kasus 11 : Undang-Undang Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif Nigeria (NEITI)	48
Studi Kasus 12 : Contoh-Contoh Inovasi EITI	49
Studi Kasus 13 : Majelis Legislatif Afrika Timur (EALA) dan Kerjasama Kawasan	52
Studi Kasus 14 : Parlemen Eropa dan Standar Akuntansi	53
Studi Kasus 15 : Proyek Transparansi Penerimaan dari <i>Arab Parliamentarians Against Corruption</i>	53
Diagram 1 : Proses EITI	16
Diagram 2 : Struktur Tatakelola Pemerintahan EITI Ghana	29
Gambar 1 : Negara-Negara Kandidat EITI per Januari 2009	18
Tabel 1 : Jenis-Jenis Kontrak yang Lazim dalam Industri Minyak, Gas, dan Pertambangan	24

Seorang pernah berkata bahwa “sinar matahari adalah desinfektan terbaik,” dan sinar matahari bagi transparansi jelas diperlukan dalam industri ekstraktif kita. Di banyak negara yang kaya sumberdaya, warga negara, dan bahkan wakil mereka, mereka pun ditinggalkan dalam kegelapan ketika berbicara tentang berapa banyak pendapatan yang dihasilkan dari sumberdaya nasional mereka. Kita tidak dapat melihat berapa banyak kekayaan dihasilkan dari minyak, gas, dan pertambangan atau ke mana perginya kekayaan tersebut. Akibatnya, apa yang seharusnya dapat digunakan untuk membantu rakyat melepaskan diri dari kemiskinan, meraih pendidikan yang mereka perlukan untuk membangun hidup yang lebih baik, serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan, menjadi salah kelola atau tersedot oleh korupsi.

Sebagai legislator, kita perlu bersikeras untuk tahu berapa yang dibayarkan oleh industri ekstraktif dan berapa yang diterima pemerintah kita, dan Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif (*Extractive Industries Transparency Initiative*, EITI) bisa membantu. EITI adalah sebuah gagasan sederhana yang dapat memberikan kejelasan tentang pendapatan yang dihasilkan dari minyak, gas, dan mineral. Dalam EITI, perusahaan-perusahaan melaporkan pembayaran yang mereka lakukan kepada pemerintah, dan pemerintah mengungkap pendapatan yang mereka terima. Mengidentifikasi perbedaan antara keduanya dapat menjadi alat pencegah yang ampuh terhadap korupsi dan menjadi langkah yang vital menuju akuntabilitas.

Para legislator dapat memainkan beberapa peran penting dalam memastikan bahwa EITI dibangun dan berjalan dengan efektif, dan panduan ini menunjukkan caranya. Panduan ini memiliki dua tujuan. Pertama adalah memperkenalkan proses EITI. Kedua adalah menawarkan saran-saran spesifik tentang bagaimana seorang legislator dapat memberikan kontribusi pada proses EITI di negaranya.

Sebagai sesama legislator, saya sepenuhnya sadar akan volume kerja yang Anda hadapi sehari-hari dari peran dan tanggung jawab Anda yang beraneka rupa. Anda terus-menerus harus menyeimbangkan tuntutan dari lembaga legislatif, konstituensi, serta keluarga dan teman-teman. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa Anda harus menimbang untuk mengambil suatu tanggung jawab tambahan dalam EITI, atau bahkan mengapa Anda harus repot-repot membaca panduan ini. Namun bila Anda datang dari suatu negara seperti negara saya yang sangat bergantung pada industri ekstraktif, Anda mungkin berhasil untuk meluangkan sebagian dari waktu berharga Anda untuk membaca panduan ini dan berpartisipasi dalam EITI. Keterlibatan Anda, dan keterlibatan rekan legislator Anda dalam EITI, tentu akan menjadi rintisan yang penting bagi kaum miskin dunia untuk menerima bagian yang adil dari kekayaan kita bersama. Ini akan menjadi sumbangan yang penting untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik dan aman bagi kita semua.

Selamat bergabung!

YM. Given Lubinda
Ketua, Komisi Urusan Ekonomi
Majelis Nasional Zambia

Panduan ini ditulis oleh Alison Paul DeSchryver, dengan John Johnson, dari *National Democratic Institute* (NDI). Matteo Pellegrini dan sebuah tim dari *Revenue Watch Institute* memberikan komentar-komentar kunci sepanjang proses perencanaan dan penyusunan serta mengelola desain panduan ini. Eddie Rich dan Anders Kråkenes dari Sekretariat Internasional EITI mengawasi produksi dari panduan ini dan memberikan masukan-masukan yang berguna untuk draft juga desainnya. Para penulis berkonsultasi pula dengan / serta mendapat masukan yang bermanfaat dari Sef Ashiagbor dan Kathy Gest dari NDI, para anggota Kelompok Penasihat (daftaranya seperti di bawah ini), dan Cindy Kroon dari *World Bank Institute*. Riset untuk panduan ini dilakukan oleh Ibu DeSchryver dan Ibu Kroon di Washington, DC, juga oleh Ada Amina Ozenovo, Abdelma'in Ezan, dan Brionne Dawson dari berturut-turut NDI di Nigeria, Yaman, dan Zambia. Riset tambahan dilakukan oleh Leo Spaans dari kantor NDI di Brussels

Publikasi ini disusun dan diproduksi dengan dukungan keuangan dari Sekretariat EITI Internasional, RWI, dan Badan Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional (USAID).

Anggota Kelompok Penasihat

YM. Dan Ogalo, mantan Anggota Parlemen Uganda, dan Anggota Dewan Legislatif Afrika Timur

Bapak John Williams, mantan Anggota Parlemen Kanada dan CEO dari *Global Organization of Parliamentarians Against Corruption*

Bapak Richard Dion, Penasihat Kebijakan dan Hubungan Eksternal, Shell

Ibu Vanessa Herringshaw, Direktur, Kantor London, *Revenue Watch Institute*

Ibu Barrie Hofmann, Deputi Direktur, Afrika Tengah dan Barat, *National Democratic Institute*

Bapak Anwar Ravat, Manajer Program EITI, Bank Dunia

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Tahukah Anda berapa banyak perusahaan-perusahaan membayar pemerintah Anda untuk minyak, gas, dan mineral yang mereka ekstraksi di negara Anda?
- Tahukah Anda berapa yang diakui diterima oleh pemerintah Anda dan ke mana uang tersebut dibelanjakan?
- Apakah informasi seperti di atas tersedia bagi publik di negara Anda?
- Apakah Anda seorang ujung tombak untuk memperjuangkan tatapemerintahan yang baik di negara Anda?

Bila jawaban Anda untuk tiga pertanyaan di atas adalah tidak, Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif (*Extractive Industries Transparency Initiative*, EITI) bisa membantu memperbaiki pengelolaan pendapatan dari minyak, gas, dan pertambangan di negara Anda. Pendapatan tersebut menawarkan potensi besar bagi pertumbuhan dan pembangunan, namun sering potensi ini gagal dipenuhi. Selubung kerahasiaan menyembunyikan berapa banyak yang diterima, ke mana perginya, dan untuk tujuan apa ini digunakan.

Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) adalah suatu standar global untuk transparansi pendapatan dalam industri minyak, gas, dan pertambangan. EITI berpusat pada dua mekanisme inti. Pertama, perusahaan dituntut untuk melaporkan pembayaran yang mereka lakukan kepada pemerintah dan pemerintah melaporkan penerimaan yang mereka terima dari perusahaan. Kedua, diperlukan suatu administrator independen untuk mencocokkan angka-angka ini di bawah pengelolaan dan penyeliaan sebuah komisi lintas pemangku kepentingan.

Program-program EITI bisa membantu memperkuat upaya-upaya pemantauan anggaran dan pengawasan, memperkuat agenda-agenda antikorupsi dan tata pemerintahan yang baik, serta memperbaiki iklim investasi suatu negara. Transparansi yang meningkat yang sering mengalir dari implementasi suatu program EITI membantu membangun kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi, dan akhirnya memastikan bahwa porsi pendapatan yang lebih besar dari sumberdaya alam akan digunakan untuk kemaslahatan umum. Legislator yang aktif dalam EITI bisa membantu negara mereka untuk mencapai tujuan-tujuan ini, dan dalam prosesnya mengukuhkan diri mereka sebagai pemimpin yang kredibel dan relevan dalam isu-isu tata pemerintahan yang baik dan transparansi.

Sebuah lembaga legislatif yang secara efektif menjalankan tiga fungsi intinya – pengawasan, perwakilan, dan penyusunan undang-undang – penting sifatnya untuk membuat EITI berhasil. Legislator dapat membantu memastikan bahwa pemerintah mereka menandatangani standar ini, bahwa programnya mengikuti Kriteria dan Prinsip-Prinsip EITI (Lihat Lampiran A), bahwa programnya relevan dengan kebutuhan khusus dari negara tersebut, dan bahwa program itu dikelola dengan baik, dimonitor, dan dipublikasikan.

Keputusan-keputusan paling penting tentang sebuah program EITI dibuat pada awal proses, ketika program tersebut dirancang dan struktur tata kelola EITI dibentuk. Keputusan-keputusan ini akan menentukan informasi apa yang akan dilaporkan dan dalam bentuk apa akan disebarkan. Keputusan ini juga akan mempengaruhi aktor-aktor mana yang akan terlibat dalam EITI dan peran apa yang akan mereka mainkan. Keberhasilan suatu program EITI tergantung pada semua faktor ini, dan legislator akan berkeinginan untuk memutuskan bagaimana cara terbaik untuk melibatkan dan mempengaruhi mereka.

Pelibatan lembaga legislatif sama pentingnya ketika laporannya diluncurkan. Laporan ini harus mengidentifikasi kesenjangan antara pembayaran perusahaan dan penerimaan negara yang dilaporkan, dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan pengumpulan yang dilakukan pemerintah dan praktek-praktek akuntansi. Legislator dapat menggunakan laporan tersebut sebagai sebuah piranti dalam meminta pertanggungjawaban pemerintah. Terakhir, legislator memainkan peran vital pada waktu validasi, langkah terakhir dalam EITI, dalam hal mana sebuah negara bisa mendapatkan pengakuan internasional yang diberikan dengan disebut sebagai negara “Compliant” EITI.

Rekomendasi-rekomendasi kunci bagi legislator

- *Terlibatlah dalam EITI untuk meningkatkan keahlian dan kepemimpinan dalam transparansi dan tata pemerintahan yang baik industri ekstraktif*
EITI membangun sebuah proses terstruktur untuk banyak aktor yang berbeda – lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan industri swasta – untuk membentuk kemitraan. Dengan terlibat dalam EITI, legislator bisa mendapatkan keahlian dalam isu-isu industri ekstraktif, dan akhirnya dapat dilihat sebagai pemimpin yang kredibel dalam sebuah isu yang penting bagi rakyat.
- *Manfaatkan sistem sebuah komisi untuk memonitor dan mengawasi EITI*
Program-program EITI paling efektif ketika dikelola dengan baik dan dimonitor, dan ketika hasilnya dipublikasikan. Melalui kerja komisi yang dikelola dan dikoordinasikan, legislator dapat mengaktifkan kewenangan pengawasan mereka. Dengar pendapat komisi dengan publik juga merupakan cara yang berguna untuk meningkatkan kesadaran akan EITI dan memasukkan input masyarakat ke dalam proses ini.
- *Koordinasikan segala upaya dengan organisasi masyarakat sipil*
Beberapa LSM sangat aktif dalam isu-isu industri ekstraktif. Mereka mungkin memiliki hubungan dengan organisasi internasional yang menyediakan dukungan pendanaan dan informasi tentang industri ekstraktif kepada mereka, termasuk tentang EITI. Organisasi-organisasi ini bisa memberikan informasi yang berguna kepada legislator tentang EITI dan industri ekstraktif, menjadi advokat yang sangat membantu dalam mendorong pemerintah untuk mengadopsi dan memperbaiki EITI, dan memberikan gagasan-gagasan terinformasi untuk menyusun suatu kebijakan dalam memperkuat atau melengkapi EITI, atau membantu meminta pertanggungjawaban pemerintah atas hilang atau salah kelolanya pendapatan negara.
- *Memasukkan EITI ke dalam komunikasi dengan konstituen*
Warga sering sangat peduli tentang bagaimana sumberdaya alam di negara mereka membawa manfaat bagi mereka, namun tahu sangat sedikit tentang apa yang diterima oleh pemerintah dari industri ekstraktif, atau bagaimana pemerintah membelanjakan pendapatan tersebut. Legislator sebaiknya menyalurkan informasi ini melalui kontak teratur mereka dengan konstituen.
- *Membangun dan meningkatkan hubungan dengan aktor-aktor EITI lainnya*
Legislator dapat menjadi lebih terinformasi, dan menjadi pengawas yang lebih baik atas proses EITI dengan bekerja dengan rekan mereka di negara-negara EITI lain dan dalam jaringan regional, jaringan parlemen internasional, dan dengan donor-donor internasional. Legislator harus memanfaatkan kepentingan internasional tentang EITI untuk meminta dukungan bagi keterlibatan mereka dalam EITI.

PENDAHULUAN

Permintaan akan minyak, gas, dan sumberdaya mineral telah memberikan efek berlawanan pada banyak negara-negara kaya sumberdaya. Alih-alih memberikan sumbangan pada pengurangan kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi, penerimaan dari berbagai sumberdaya ini sering mengarah pada korupsi skala besar, lebih sedikit pembangunan, dan konflik.

Dengan tiadanya lembaga-lembaga pemerintah yang kuat yang transparan dan akuntabel terhadap rakyat, pendapatan dari minyak, gas, dan pertambangan sering dikelola secara tidak efektif. Aliran dana yang besar dan tidak diatur kepada pemerintah bisa menciptakan godaan besar bagi mereka yang berkuasa untuk melakukan korupsi. Pejabat publik dapat kehilangan visi akan perlunya pembelanjaan yang hati-hati pada tahun-tahun “berkelimpahan” dan menggunakan patronase untuk memberikan perbaikan-perbaikan jangka pendek terhadap masalah-masalah sosial dan ekonomi. Hubungan antara warga dan pemerintah tergerogoti ketika pemimpin pemerintahan kurang tergantung pada pendapatan dari pajak dan sektor non-ekstraktif. Akhirnya, manfaat yang diperoleh hanya terkonsentrasi pada sedikit orang, sementara sebagian besar penduduk tetap berada dalam kemiskinan.

Warga negara, badan-badan pemerintah, masyarakat sipil, perusahaan-perusahaan, dan organisasi-organisasi internasional telah mulai menangani “kutukan sumberdaya” dengan membangun dan memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor ekstraktif. Dengan akses pada informasi yang lebih baik tentang bagaimana pemerintah mengelola sektor ini, legislator dan publik dapat memeriksa kegiatan-kegiatan pemerintah, mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting, dan mendorong perbaikan-perbaikan. Transparansi saja tidak bisa memperbaiki tata kelola dan pembangunan di negara-negara kaya sumberdaya. Sebaliknya, akuntabilitas tidak mungkin tercipta tanpa informasi dan karenanya transparansi adalah langkah yang penting.

Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif adalah satu upaya yang mulai dipakai oleh banyak negara kaya sumberdaya. EITI memperkuat kembali prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan mendorong verifikasi penuh dan publikasi tentang pembayaran oleh perusahaan dan penerimaan pemerintah. Melalui kemitraan antara warga, badan-badan pemerintah, dan perusahaan, EITI membantu menyalakan cahaya transparansi di atas industri ekstraktif dan menjadi sebuah piranti penting untuk menuntut akuntabilitas pemerintah dalam penggunaan penerimaan tersebut.

Lembaga legislatif memiliki peran penting untuk bekerja dalam EITI. Panduan ini menyediakan informasi bagi legislator¹ tentang proses EITI dan menawarkan saran-saran praktis bagi mereka untuk mendorong pemerintah berpartisipasi dan memastikan bahwa program EITI berhasil. Ini dirancang terutama bagi legislator dan para stafnya, namun dapat pula berguna bagi pemimpin politik, pejabat pemerintah, organisasi-organisasi masyarakat sipil, dan aktor-aktor internasional.

Panduan ini terdiri atas 10 Bab. Bab I memberikan ikhtisar tentang EITI dan proses EITI. Bab II mengulas konteks keterlibatan lembaga legislatif dalam EITI dan membahas secara luas bagaimana para legislator bisa memberikan sumbangannya. Terakhir, Bab III sampai X masing-masing membicarakan sebuah aspek spesifik dari proses EITI dan membagikan saran-saran spesifik tentang peran yang dapat dimainkan oleh lembaga legislatif untuk memastikan bahwa prosesnya berhasil.

Box 1

“Kutukan Sumberdaya” dan Kemiskinan

“Kutukan sumberdaya” adalah sebuah istilah yang jamak digunakan untuk menggambarkan situasi paradoksal di mana negara-negara dengan kekayaan sumberdaya alam melimpah lebih cenderung menderita akibat tingginya tingkat kemiskinan, lemahnya pertumbuhan ekonomi, dan lambatnya pembangunan.

Warga yang termiskin dari suatu negara biasanya mereka yang mendapat dampak paling negatif. Negara-negara berkembang yang kaya sumberdaya sering memiliki harapan hidup yang lebih rendah, serta kesenjangan kemakmuran, tingkat buta huruf, dan kematian bayi lebih besar, dibandingkan negara-negara yang tidak sekaya mereka dalam sumberdaya alam. Lepas dari kekayaan mereka, negara-negara ini cenderung berada di bagian bawah jenjang indikator pembangunan manusia internasional.

1 Demi penyederhanaan, panduan ini menggunakan istilah legislator untuk menyebut anggota parlemen, legislator, deputi (pimpinan Dewan), anggota Kongres, dll. Demikian pula, istilah lembaga legislatif digunakan sebagai istilah generik untuk mencakup lembaga perwakilan nasional apapun, termasuk parlemen, kongres, majelis, dll.

Apa Itu EITI?



Bab I.

Untuk terlibat secara efektif dalam EITI, legislator perlu tahu beberapa sifat esensial dari Prakarsa ini. Bab ini memberikan ikhtisar singkat mengenai bagaimana EITI bekerja dan dikelola, dan bagaimana negara-negara dapat mengambil manfaat.

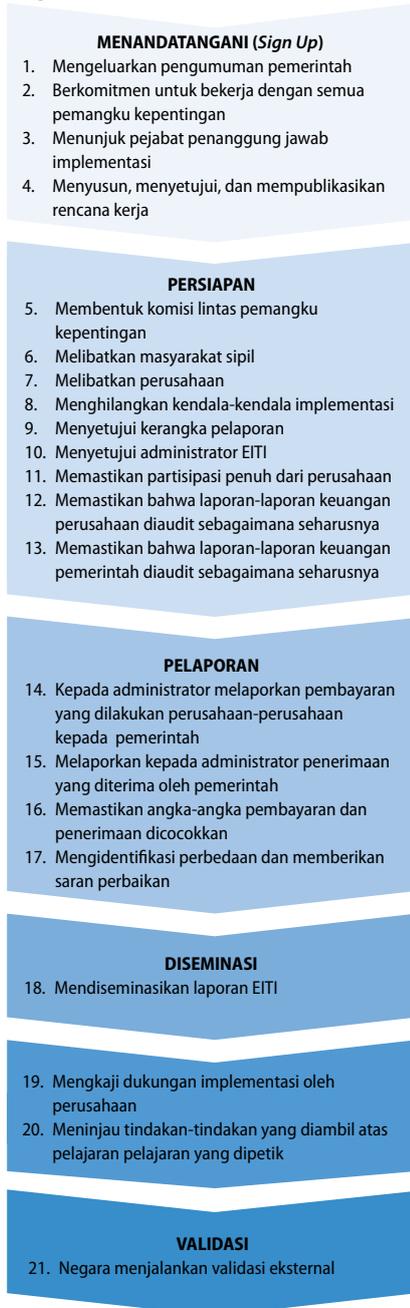
EITI adalah sebuah standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif. Standar ini berpusat pada rekonsiliasi antara pembayaran yang dilakukan perusahaan-perusahaan, dengan penerimaan pemerintah, serta pelaporan informasi mengenai hal tersebut kepada publik. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kemungkinan kesenjangan antara pembayaran dan penerimaan serta menginvestigasi dan mengatasi sebab-sebabnya.

Proses EITI dilakukan dengan menggunakan jasa dari administrator independen dan diadakan dengan supervisi sebuah panitia pengarah yang terdiri dari multi pemangku kepentingan. Administrator tersebut menyusun sebuah laporan publik dengan data pendapatan dan pembayaran serta sebuah penjelasan mengenai perbedaan data dan kelemahan-kelemahan prosesnya. Setiap program EITI harus mengikuti Prinsip-Prinsip dan Kriteria EITI, dan harus memenuhi 20 langkah dalam empat tahapan seperti digambarkan dalam Diagram 1 di halaman berikut. Namun, keseluruhan proses dirancang untuk fleksibel sehingga setiap negara dapat menyesuaikannya menurut keperluan. Begitu disusun, proses EITI harus dilakukan setiap tahun.

Supaya sebuah negara dapat menjadi "kandidat" EITI, pemerintahnya harus secara publik memberikan komitmen kepada Prakarsa ini dan memenuhi keempat langkah dalam tahapan Menandatangani (*Sign Up*).² Begitu sebuah negara telah menerapkan EITI dengan penuh, dan telah menjalani proses Validasi yang berhasil (Lihat *Bab VIII: Memastikan Proses Validasi yang Berhasil*), negara tersebut menjadi "compliant" EITI. Dengan berlanjutnya program EITI, Validasi dilakukan setiap dua tahun.

² Lihat Lampiran A: Kriteria EITI dan Prinsip-Prinsip EITI.

Diagram 1 : Proses EITI



Apa manfaat dari EITI?

Negara-negara memilih bergabung dengan EITI untuk sejumlah alasan. Paragraf-paragraf berikut menggambarkan beberapa alasan di antaranya. EITI dapat membantu untuk:

Memastikan bahwa bagian yang lebih besar dari penerimaan negara dari minyak dan sumberdaya mineral digunakan untuk keuntungan rakyat suatu bangsa. Ini merupakan manfaat utama dari EITI.

Memperkuat pemantauan dan pengawasan anggaran. Laporan-laporan EITI dapat menjadi piranti yang kuat untuk warga dan legislator dalam memahami seberapa besar uang yang dikumpulkan pemerintah dan, di mana negara-negara memilihnya, bagaimana dana-dana ini dibelanjakan. Dalam beberapa kasus, EITI telah menuntun pada adanya pemulihan dari dana pemerintah yang tidak dilaporkan atau kekurangan-kekurangan pembayaran dari perusahaan.

Memperkuat kembali agenda-agenda anti korupsi dan tata pemerintahan yang lebih luas. Program-program EITI yang efektif dapat membuat praktek-praktek korupsi lebih sulit untuk disembunyikan. Dengan mendorong transparansi di bidang di mana kerahasiaan sering menjadi hal yang jamak, partisipasi EITI dapat membantu membangun preseden untuk memperbaiki transparansi di bidang pemerintahan lainnya.

Membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga publik. Ketika pejabat terpilih menggunakan EITI untuk mendorong keterbukaan dan diskusi publik tentang bagaimana pemerintah menerima dan membelanjakan penerimaan negara, warga dapat merasa terberdayakan dan terhubung dengan lebih baik dengan proses kebijakan; lebih percaya bahwa kepentingan-kepentingan mereka akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan pemerintah; dan cenderung lebih percaya bahwa mereka bisa memainkan suatu peran dalam meminta pertanggungjawaban pemerintah.

Mendorong berkurangnya rasa permusuhan antara pemerintah, perusahaan-perusahaan, dan masyarakat atau warga. Industri-industri ekstraktif cenderung menimbulkan gangguan pada masyarakat tempat mereka beroperasi. Karena industri ini melibatkan pergolakan fisik terkait tanah dan pekerja dari luar masyarakat setempat (dan kadang-kadang dari luar negeri), cenderung ada sikap permusuhan, dan dalam kasus-kasus ekstrem mengarah pada konflik. Pihak pemerintah dan perusahaan sering saling menyalahkan. Transparansi dapat membangun kepercayaan di antara para aktor ini, dan EITI dapat menciptakan suatu forum yang aman bagi dialog, pemahaman, dan resolusi.

Memperbaiki iklim investasi. Implementasi EITI dari suatu negara mengirim sinyal kepada investor dan perusahaan internasional bahwa pemerintah berkomitmen untuk memperkuat transparansi

Studi Kasus 1

Memulihkan Dana di Nigeria

Laporan audit EITI Nigeria yang pertama menemukan perbedaan sebesar \$230 juta naira Nigeria antara yang dilaporkan perusahaan sebagai telah dibayarkan, dengan apa yang dilaporkan telah diterima oleh Bank Sentral Nigeria. Setelah auditor mengejar isu ini lebih jauh, mereka mengidentifikasi sejumlah masalah akuntansi, pembukuan, dan lainnya yang dapat menjelaskan sejumlah besar porsi dana yang semula tidak dipertanggungjawabkan. Hasilnya, jumlah dari dana yang hilang turun menjadi \$8.5 juta.

Pada tahun 2008, ketika sebuah panitia ad-hoc dari Majelis Nasional mulai melakukan dengar pendapat untuk memeriksa kegiatan-kegiatan Perusahaan Minyak Nasional Nigeria (NNPC), para anggota mengutip laporan EITI pada waktu menanyai pejabat-pejabat dari Departemen Sumberdaya Minyak.

dan akuntabilitas. Negara tersebut mungkin akan dianggap lebih menarik sebagai tujuan investasi, yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi di sektor lain; dalam jangka lebih panjang, akses pada modal yang lebih murah dapat meningkat dengan naiknya peringkat risiko negara tersebut.

Siapa yang terlibat dalam EITI?

EITI menuntut partisipasi aktif dari pemangku kepentingan yang luas. EITI Source Book mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai "...perorangan, masyarakat, kelompok, dan organisasi yang memiliki kepentingan terhadap hasil EITI dan mereka yang bisa mempengaruhinya."³ Di kebanyakan negara, ini mencakup perwakilan dari pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, yang duduk di panitia pengarah atau kelompok kerja lintas pemangku kepentingan (MSG). Peran dari legislator bervariasi, dari berpartisipasi secara langsung dalam MSG, sampai memantau proses EITI dengan kapasitas pengawasan mereka. MSG, yang dibahas lebih panjang di Bab IV, adalah badan pembuat keputusan utama dari EITI.

Bagaimana EITI dikelola dan didanai di masing-masing negara?

Setiap negara yang menerapkan EITI mengelola sendiri proses EITI-nya, dipimpin oleh seorang pejabat pemerintah senior dan MSG. Sumber pendanaan utama bagi program EITI seharusnya pemerintah dari negara yang menerapkan ini. Sebuah Multi-Donor Trust Fund (MDTF) atau Dana Perwalian Multi-Donor, dikelola oleh Bank Dunia, juga tersedia untuk bantuan teknis tertentu di sejumlah negara.

Bagaimana EITI dikelola dan didanai di tingkat internasional?

Di tingkat internasional, EITI dipimpin oleh Dewan Pengurus EITI beranggotakan 20 orang. Sekretariat EITI Internasional, berkedudukan di Oslo, Norwegia, memberikan dukungan kepada Dewan Pengurus EITI dan merupakan titik kontak pertama bagi organisasi-organisasi yang terlibat dan tertarik dengan EITI. Badan ini mendorong proses EITI, mengkoordinasikan komunikasi dan keputusan-keputusan kebijakan oleh para pemangku kepentingan EITI internasional, dan menyediakan panduan bagi mereka yang menerapkan EITI.

Bagaimana legislator dapat belajar lebih banyak mengenai EITI?

Tempat pertama untuk dijangkau adalah situs web internasional dari EITI (www.eitransparency.org) dan daftar sumber bacaan di Lampiran C panduan ini. Legislator juga dapat meminta pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan informasi dari pejabat-pejabat kantor pemerintah yang mungkin menjadi ujung tombak EITI (misalnya, minyak atau tambang, keuangan, ekonomi, atau perencanaan), ataupun mitra-mitra masyarakat sipil setempat dan kantor-kantor Kampanye *Publish What You Pay*, *Transparency International*, dan *Revenue Watch Institute* (RWI). Kantor perwakilan Bank Dunia di negara yang bersangkutan juga dapat memberikan informasi dan latar belakang tambahan mengenai EITI.

Box 2

Pemangku Kepentingan EITI Pada Umumnya

Pemerintah atau lembaga-lembaga publik

- Badan minyak atau pertambangan
- Badan yang mengumpulkan atau mengelola penerimaan negara
- Badan pembangunan ekonomi dan perencanaan
- Pemerintah sub-nasional
- Perusahaan-perusahaan minyak atau tambang
- Pemimpin tradisional
- Badan pemeriksa keuangan negara
- Lembaga legislatif (Komisi anggaran, keuangan, perencanaan, dan sumberdaya alam)

Sektor swasta

- Minyak, gas, dan perusahaan tambang (internasional, swasta domestik, BUMN)
- Perusahaan minyak atau tambang nasional
- Investor
- Asosiasi-asosiasi bisnis dan industri

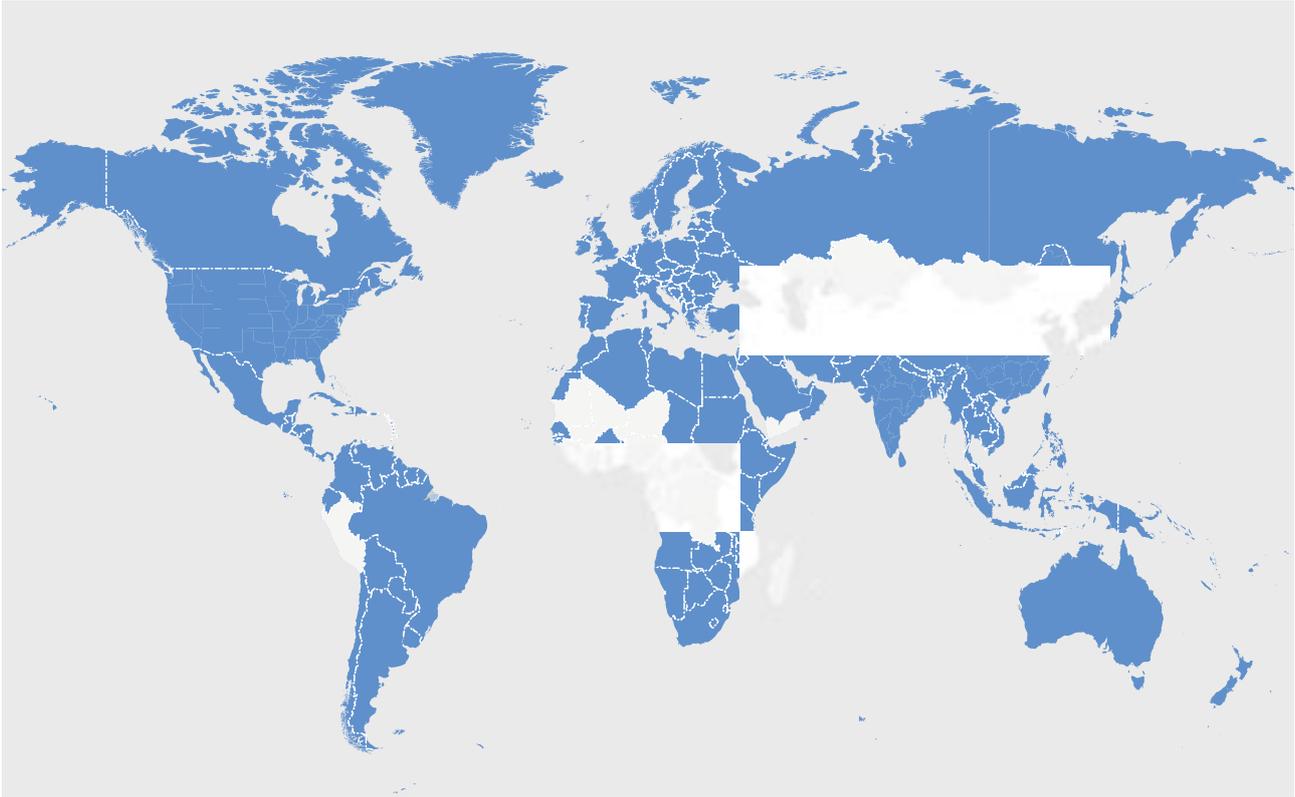
Masyarakat sipil dan lainnya

- Organisasi berbasis masyarakat
- LSM nasional
- LSM internasional dan afiliasi lokal mereka
- Media
- Serikat buruh
- Lembaga-lembaga akademik dan penelitian
- Organisasi berbasis keyakinan
- Pemimpin adat

Sumber : *Implementing EITI: Applying Early Lessons from the Field*, World Bank, 2008.

3 EITI Source Book, hal. 5, *Extractive Industries Transparency Initiative*, 2005

Gambar 1. Negara-Negara Kandidat EITI per Januari 2009



Negara-Negara Kandidat EITI (Januari 2009):

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| ■ Azerbaijan | ■ Madagaskar |
| ■ Kamerun | ■ Mali |
| ■ Republik Afrika Tengah | ■ Mauritania |
| ■ Pantai Gading | ■ Mongolia |
| ■ Republik Demokratik Kongo | ■ Niger |
| ■ Guinea Ekuatorial | ■ Nigeria |
| ■ Gabon | ■ Peru |
| ■ Ghana | ■ Republik Kongo |
| ■ Guinea | ■ Sao Tome e Principe |
| ■ Kazakhstan | ■ Sierra Leone |
| ■ Kirgistan | ■ Timor-Leste |
| ■ Liberia | ■ Yaman |

Lembaga Legislatif dan EITI



Bab II.

Para legislator memainkan peran krusial untuk membuat EITI efektif. Bab ini membahas apa saja yang tercakup dalam peran ini, dan memberikan ulasan mengenai piranti-piranti dan strategi-strategi yang dapat digunakan legislator untuk memastikan EITI berhasil di negara mereka.

"Legislator harus proaktif dalam pengawasan penerimaan negara dari industri ekstraktif... hanya dengan ini mereka akan dapat membantu berjuang melawan kemiskinan."

Senator Lee Maeba, Ketua, Komisi Petroleum Hulu Senat
Majelis Nasional Nigeria

Bagaimana para legislator dapat berkontribusi pada EITI?

Sebuah lembaga legislatif yang menjalankan secara efektif tiga fungsi intinya – pengawasan, perwakilan, dan pembuatan undang-undang – penting sifatnya bagi kesuksesan EITI.

■ *Pengawasan*

Lembaga legislatif dibuat berdaya untuk memeriksa kegiatan-kegiatan pemerintah, untuk memastikan bahwa program-program dijalankan secara efektif dan legal, dan bahwa dana yang dialokasikan dipertanggungjawabkan. Dengan penuh keahlian menggunakan periode tanya jawab, melakukan dengar pendapat publik, serta mengundang menteri, kalangan usaha, dan lainnya untuk memberikan keterangan di depan komisi, para legislator dapat membantu EITI tertentu dikelola dengan baik dan laporan EITI dikeluarkan tepat

Box 3

Menstrukturkan Keterlibatan Legislatif dalam EITI

Legislator akan berkeinginan untuk mengorganisir dan mengkoordinir keterlibatan mereka dalam EITI. Mereka mungkin ingin membentuk kelompok kerja legislatif tentang EITI atau mengkoordinasi kegiatan-kegiatan melalui partai politik atau kaukus koalisi. Namun, karena pentingnya peran pengawasan pada EITI, komisi kemungkinan besar adalah ajang yang paling efektif.

Dalam beberapa kasus, satu komisi mungkin mencakup mayoritas dari isu terkait EITI. Komisi Urusan Ekonomi dan Tenaga Kerja Zambia, misalnya, mengawasi Departemen Pertambangan dan Pembangunan Mineral, Keuangan, Perencanaan Nasional, serta Perniagaan, Perdagangan dan Industri. Lebih sering, beberapa komisi – anggaran, minyak atau pertambangan, antikorupsi – memiliki yurisdiksi atas satu aspek EITI, dan mungkin perlu terlibat dalam berbagai tahapan proses EITI.

waktu, akurat dan dipublikasikan secara luas. Begitu sebuah laporan dirilis, legislator dapat memastikan bahwa hasilnya dipublikasikan secara luas, dan bahwa pemerintah mengambil langkah atas kesenjangan dan kelemahan yang ada.

■ *Perwakilan*

Dengan menjalankan fungsi perwakilan mereka, para legislator dapat membantu membentuk program EITI dan memastikan program ini mencerminkan cakupan kepentingan yang luas. Legislator dapat terlibat dalam kelompok lintas pemangku kepentingan EITI (MSG), dan bisa membantu memastikan bahwa organisasi masyarakat sipil (CSO) yang memiliki komitmen pada transparansi sumberdaya terlibat dan aktif dalam MSG. Melalui dengar pendapat publik, wawancara dengan media, penjangkauan konstituen, dan metode-metode lainnya, para legislator dapat membangun kesadaran publik akan EITI dan masalah-masalah yang dirumuskannya, juga mempengaruhi opini publik untuk membuat pemerintah akuntabel.

■ *Pembuatan Undang-Undang*

Terakhir, bertindak dalam kapasitas mereka untuk membuat undang-undang, lembaga legislatif dapat memastikan bahwa pemerintah mereka menandatangani dan berpartisipasi secara berarti dalam proses EITI. Beberapa negara telah menemui kendala hukum untuk implementasi EITI, sehingga sebuah revisi perundang-undangan diperlukan. Legislator dapat memastikan perubahan perundang-undangan ini dengan cara yang mencerminkan dan memperkuat transparansi yang dituntutkan melalui EITI. Selain itu, kendati tidak merupakan bagian dari persyaratan EITI, beberapa negara telah memperkuat EITI dengan mengukuhkan prosesnya sendiri menjadi undang-undang.

Bagaimana legislator bisa mengambil keuntungan dari terlibat dalam EITI?

Legislator telah memilih terlibat dalam EITI untuk sejumlah alasan. Prakarsa ini memberikan sebuah kesempatan kepada lembaga legislatif, partai politik, dan legislator perorangan untuk menjadikan diri mereka pemimpin yang relevan dan kredibel dalam isu-isu transparansi industri ekstraktif, yang sangat dipedulikan oleh warga. Ini dapat berfungsi sebagai tempat untuk membangun kepakaran dan kemitraan dengan aktor lain dalam isu-isu industri ekstraktif. Legislator yang bekerja secara dekat dengan aktor-aktor lain dalam EITI mungkin dapat menggunakan keterlibatan mereka sebagai sebuah platform untuk terlibat dalam isu-isu penting lain terkait perbaikan manajemen industri ekstraktif. Terakhir, informasi yang diperoleh melalui pelaporan EITI bisa menjadi piranti penting untuk mengembangkan dan memperkuat kegiatan-kegiatan pemantauan dan pengawasan anggaran oleh lembaga legislatif.

Apa piranti dan strategi legislatif yang bisa digunakan untuk terlibat dalam EITI?

Bab-bab berikutnya dari panduan ini membahas beberapa piranti legislatif untuk belajar mengenai dan terlibat dalam EITI. Sebagian besar dari saran-saran dapat dimasukkan dalam empat kategori berikut:

■ *Koordinasikan upaya-upaya dengan organisasi masyarakat sipil*

Beberapa LSM sangat aktif dalam isu-isu industri ekstraktif. Dan mereka mungkin memiliki hubungan dengan organisasi internasional seperti Transparansi International dan Kampanye *Publish What You Pay*, yang memberikan dukungan finansial dan informasi tentang industri ekstraktif, dan proses EITI. Organisasi-organisasi ini bisa menyediakan informasi yang berguna tentang EITI dan industri ekstraktif kepada legislator, menjadi advokat yang

membantu dalam mendorong pemerintah untuk mengadopsi atau meningkatkan EITI, memberikan ide-ide yang terinformasi mengenai suatu kebijakan untuk memperkuat atau melengkapi EITI serta membantu meminta pertanggungjawaban pemerintah atas penerimaan yang tidak dilaporkan atau tidak dikelola dengan baik.

■ *Memasukkan EITI ke dalam komunikasi konstituen*

Warga sering sangat peduli tentang apakah proses ekstraksi sumberdaya alam di negara mereka menguntungkan mereka, namun tahu sedikit tentang apa yang diterima pemerintah, dan bagaimana pemerintah membelanjakan penerimaan dari industri ekstraktif. Legislator dapat menyampaikan informasi ini melalui kontak teratur mereka dengan warga.

■ *Memperkuat dan memanfaatkan sistem komisi*

Lembaga legislatif dengan sistem komisi yang efektif membagi pekerjaan mereka, dan dapat meraih jauh lebih banyak capaian daripada lembaga tanpa komisi yang efektif. Komisi dengan yurisdiksi tentang isu-isu terkait EITI dapat membangun kepakaran EITI tertentu serta sering lebih baik bekerja lintas partai, dan melakukan kompromi-kompromi kecil yang diperlukan untuk mencapai persetujuan atas legislasi dan kebijakan. Melalui dengar pendapat publik, komisi juga merupakan sebuah, dan sering juga satu-satunya, ajang yang berguna untuk melibatkan masukan publik ke dalam proses pembuatan kebijakan.

Karena EITI melibatkan isu-isu yang lazimnya dicakup oleh beberapa komisi – sumberdaya alam, anggaran dan keuangan, laporan publik, antikorupsi – pengawasan yang efektif menuntut terkoordinasinya aktivitas dari komisi-komisi ini dan dibaginya informasi di antara mereka. Lembaga legislatif juga dapat membentuk komisi ad-hoc, panitia khusus, atau panitia investigatif untuk mempelajari atau menangani isu-isu tertentu. Terkait EITI, membentuk komisi semacam itu nampaknya akan menjadi sangat berguna ketika sebuah laporan telah dirilis, untuk menginvestigasi kelemahan-kelemahan atau perbedaan yang ditemukan oleh administrator dan gagal diatasi atau diperbaiki oleh pemerintah.

■ *Membangun hubungan dengan aktor-aktor EITI lainnya*

Terakhir, legislator bisa menjadi lebih terinformasi, dan menjadi pengawas yang lebih efektif dari proses EITI dengan bekerja bersama legislator – legislator lain di negara-negara EITI, dalam jaringan EITI regional, jaringan legislatif internasional, dan dengan donor-donor internasional..

Masing-masing dari bab berikutnya dalam panduan ini menyediakan informasi tentang aspek-aspek proses EITI yang paling relevan bagi legislator, dan menjelaskan bagaimana legislator bisa memberikan kontribusinya. Ringkasan dari strategi-strategi legislatif ini juga dimasukkan dalam *Lampiran B*.

Bersiap untuk EITI



Bab III.

Sebuah program EITI harus mencerminkan karakteristik-karakteristik spesifik dari sektor ekstraktif masing-masing negara. Bab ini menggambarkan jenis dan sumber informasi yang dapat membantu para legislator memahami dengan lebih industri ekstraktif, dan menyarankan piranti-piranti spesifik yang bisa digunakan legislator untuk memberikan kontribusi pada EITI sebelum, dan selama, tahap-tahap awal EITI.

Apa informasi tentang industri ekstraktif yang penting diketahui bagi EITI?

Pertanyaan-pertanyaan apa yang harus diajukan oleh para legislator yang tertarik untuk menyusun sebuah program EITI? Lima hal berikut ini adalah awal yang baik.⁴

1. *Adakah industri ekstraktif dan seberapa besar masing-masing berkontribusi pada perekonomian nasional? Industri yang mana yang memberikan penerimaan terbesar pemerintah? Berapa besar kontribusi mereka pada GDP? EITI menuntut bahwa negara-negara mendefinisikan industri-industri yang mana yang akan dimasukkan ke dalam proses pelaporan.*
2. *Siapa aktor-aktor kunci dalam industri tersebut? Perusahaan-perusahaan apa, internasional dan domestik, yang beroperasi di masing-masing industri? Apakah mereka BUMN, seperti perusahaan minyak nasional, atautkah pemerintah menjadi mitra dalam operasi pertambangan atau minyak? EITI meminta semua perusahaan dari industri-industri yang relevan untuk melaporkan data mereka.*

⁴ Diskusi yang lebih terperinci tentang isu-isu ini dapat dilihat di *Drilling Down*, Bab 6-8, Revenue Watch Institute, 2008

3. *Jenis-jenis kontrak seperti apa yang telah ditandatangani antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan? Kontrak-kontrak memuat secara spesifik berapa banyak uang yang seharusnya diterima pemerintah dan dalam bentuk apa (seperti: jenis-jenis pembayaran), siapa yang menanggung biaya produksi, siapa mengelola operasi, bagaimana sumberdaya dibagi atau dijual, dan dalam urutan seperti apa para pihak dalam kontrak akan dibayar. Ada dua jenis kontrak utama yang relevan untuk EITI, sebagaimana digambarkan dalam Tabel 1, di bawah ini.*
4. *Apa kunci utama aliran-aliran penerimaannya? Perusahaan-perusahaan membayar pemerintah dalam bentuk pajak, royalti, pembayaran in-kind, bonus, dividen, dan sewa. EITI menuntut bahwa semua pembayaran material minyak, gas, dan pertambangan diumumkan. Aliran penerimaan total, dijumlahkan semua, merupakan “take” pemerintah atau pembagian dari operasi industri-industri ini.*
5. *Apa entitas-entitas pemerintah yang terlibat dalam mengelola penerimaan-penerimaan industri ekstraktif? Entitas-entitas pemerintah yang mana yang mengumpulkan penerimaan dari perusahaan-perusahaan ini? Yang mana yang mengatur industri tersebut? Ke mana persisnya uang mengalir ketika perusahaan-perusahaan melakukan pembayaran mereka – di entitas pemerintah yang mana uang disimpan?*

Tabel 1: Jenis-Jenis Kontrak yang Lazim dalam Industri Minyak, Gas, dan Pertambangan⁵

Jenis Kontrak	Bagaimana Bekerjanya	Dalam bentuk apa pemerintah menerima uang	Sektor yang lazim menggunakannya
Kontrak Pembagian Produksi (<i>Production Sharing Contract, PSC</i>)	Perusahaan mengelola pembangunan operasinya, dan terdapat formula yang disepakati untuk menentukan proporsi dari sumberdaya yang diekstraksi (barrel minyak, ton mineral, dll.) yang merupakan milik pemerintah, dan yang menjadi milik perusahaan	Proporsi (atau “bagian”) produksi yang merupakan hak pemerintah. Pemerintah sering mengambil sumberdaya ini secara in-kind, dan menjualnya atau menggunakannya secara domestik. Dalam beberapa kasus, pemerintah menerima pembayaran dari perusahaan untuk nilai bagian pemerintah. Perusahaan mungkin juga membayar royalti, pajak, sewa lahan, dan pembayaran lainnya. Pemerintah dapat memperoleh penerimaan dari dividen dari perusahaan sumberdaya nasional yang bekerja dalam kelompok yang menjalankan operasi.	Minyak
Kesepakatan Konsesi	Pemerintah memberikan lisensi untuk hak membangun wilayah geografis tertentu	Royalti <i>Fee</i> untuk ukuran lahan Pajak Bonus Pajak sosial Dividen dari partisipasi perusahaan sumberdaya nasional Sewa lahan	Pertambangan Minyak

⁵ Kesepakatan jasa-jasa teknis, di mana di dalamnya pemerintah mengontrol sumberdaya dan melakukan kesepakatan dengan sebuah perusahaan untuk menyediakan jasa-jasa teknis eksplorasi, konstruksi, dan manajemen, juga lazim dalam industri minyak. Namun, kesepakatan ini tidak memberikan aliran-aliran keuntungan yang biasanya relevan bagi EITI.

Piranti-piranti apa yang terbaik bagi seorang legislator untuk mendapatkan informasi ini?

Legislator memiliki sejumlah piranti untuk dipilih ketika mencari informasi ini. Pendekatan-pendekatan yang digambarkan di bawah ini berfokus pada mengevaluasi kepakaran (*expertise*) lokal dan internasional yang ada dari kalangan masyarakat sipil, lembaga akademis, organisasi internasional, perusahaan, dan pemerintah. Ketika sumberdaya legislatif untuk aktivitas-aktivitas ini terbatas, donor internasional dan organisasi lainnya⁶ mungkin dapat menyediakan dukungan.

- *Melakukan kunjungan lapangan*
Para legislator yang mengunjungi suatu operasi minyak, gas, atau pertambangan mendidik diri mereka sendiri tentang bagaimana sumberdaya alam diekstraksi. Pertemuan-pertemuan dengan karyawan perusahaan dan wakil-wakil dari departemen yang bertanggung jawab untuk industri tersebut dapat memberikan tambahan kejelasan tentang operasi dan keuangan dari industri tersebut.
- *Mengadakan pengarahannya atau dengar pendapat informatif*
Para legislator dapat mengundang pejabat departemen minyak dan pertambangan, wakil-wakil perusahaan, masyarakat sipil, dan pakar-pakar lainnya untuk memberikan pengarahan kepada anggota pada pertemuan komisi atau sebuah dengar pendapat informatif. Di banyak negara, kelompok-kelompok masyarakat sipil yang memiliki pengetahuan tentang aspek-aspek teknis, legal, atau keuangan dari industri ekstraktif mengadakan pengarahannya yang serupa bagi kolega-kolega mereka, dan para legislator harus mengambil manfaat dari kepakaran mereka.
- *Mengadakan studi banding ke negara yang menerapkan EITI*
Pertukaran kunjungan dapat memberikan informasi yang nyata dan komparatif tentang bagaimana EITI berjalan dan bagaimana ini bisa menguntungkan sebuah negara. Dengan bertemu dengan aktor-aktor EITI di suatu negara, para legislator dapat memperoleh gambaran mengenai bagaimana dan mengapa keputusan-keputusan tentang EITI dibuat, yang dapat memberikan informasi kepada pandangan seorang legislator untuk program EITI di negaranya sendiri. Sekretariat EITI dan lainnya mungkin dapat memfasilitasi kunjungan semacam ini.
- *Membayai kajian*
Komisi legislatif dapat memanfaatkan kepakaran lokal atau internasional dalam industri ekstraktif dengan meminta pakar dari universitas atau organisasi masyarakat sipil untuk melakukan penelitian tentang isu-isu EITI kunci. Kajian-kajian semacam ini dapat memeriksa aspek-aspek fiskal, legal, dan operasional dari industri tersebut dan menyoroti permasalahan-permasalahan kunci yang mungkin relevan bagi EITI.
- *Mengeluarkan laporan komisi*
Komisi juga dapat mengeluarkan sebuah laporan publik yang menjelaskan temuan-temuan dari kajian atau kegiatan-kegiatan komisi lainnya. Laporan komisi sering digunakan dalam menyusun undang-undang atau untuk mendorong pemerintah untuk bertindak atas sebuah isu. Bila pemerintah belum mengadopsi EITI, laporan seperti itu dapat membuat rekomendasi bagi pemerintah untuk melakukannya..

Box 4

Memetakan Aliran Keuangan

Beberapa program EITI telah melakukan pemetaan atas aliran keuangan untuk belajar tentang bagaimana uang dipertukarkan antara perusahaan-perusahaan ekstraktif dan pemerintah. Sebuah pemetaan aliran keuangan di Kamerun tercakup dalam laporan rekonsiliasi pertama. Lihat *Lampiran E*.

⁶ NDI dan RWI keduanya adalah contoh organisasi yang mungkin dapat memberikan bantuan teknis dengan jenis-jenis kegiatan seperti ini.

Kajian EITI di Zambia

Zambia mengumumkan rencananya untuk bergabung di EITI pada bulan Juli 2008. Pemerintah mengadakan sebuah **kajian tentang cakupan (scoping study)** EITI dengan bantuan dari Bank Dunia. Kajian ini, yang dirilis ke publik, mencakup informasi tentang:

- Tingkat kepemilikan dan produksi di industri pertambangan
- Sejarah dan statistik kunci tentang industri tersebut, termasuk aliran-aliran penerimaan dan perjanjian pertambangan
- Standar mengaudit;
- Pandangan para pemangku kepentingan tentang EITI; dan
- Kemungkinan kendala-kendala untuk implementasinya.

Sumber : <http://go.worldbank.org/UD915M8920>

Apa yang dapat dilakukan legislator untuk mendorong pemerintah untuk menandatangani?

Bila pemerintah belum menandatangani EITI, atau sudah, namun belum dideklarasikan sebagai sebuah negara kandidat (*candidate country*), lembaga legislatif dapat membangun dukungan bagi prakarsa ini dengan mendorong kesadaran publik dan mendorong tekanan publik kepada pemerintah untuk bertindak. Bagaimana ini dapat dilakukan?

- *Ikut serta dalam konferensi atau workshop tentang EITI*
EITI telah berjalan secara paling baik di negara-negara di mana aktor-aktornya telah dikumpulkan sejak awal membahas Prakarsa ini. Para legislator dapat berperan serta di dalam workshop atau konferensi, dan membahas pandangan-pandangan mereka tentang perlunya EITI sekaligus bagaimana mereka ingin melihat lembaga legislatif berpartisipasi. Donor-donor internasional dan LSM-LSM lokal atau internasional mungkin dapat membantu memfasilitasi acara-acara ini.
- *Mengeluarkan sebuah resolusi di lembaga legislatif*
Lembaga legislatif dapat mendorong pihak eksekutif untuk menandatangani EITI dengan mengeluarkan sebuah resolusi meminta pemerintah bergabung dengan EITI. Resolusi semacam itu dapat lebih kuat bila mencantumkan secara spesifik kerangka waktu untuk dilakukannya tindakan. Bila pihak eksekutif menolak untuk menandatangani dalam kurun waktu tersebut, lembaga legislatif dapat secara publik menanyakan kepada menteri terkait dalam pertanyaan parlemen kepada pemerintah (*parliamentary questions*) atau melalui dengar pendapat publik.
- *Bekerja melalui media untuk membangun kesadaran publik.*
Legislator dapat membangun kesadaran, mempromosikan EITI, dan mendesak pemerintah untuk bergabung dengan EITI dengan mengadakan konferensi pers dan kegiatan media lainnya. Di beberapa negara, para legislator sering menulis artikel opini dan kolom surat kabar, dan ini juga merupakan tempat yang bagus untuk mempromosikan EITI.

Membangun Struktur Tatakelola EITI



Bab IV.

Keberhasilan EITI tergantung pada seberapa baik ia dikelola. Bab IV menggambarkan struktur tatakelola EITI dan menyoroti cara-cara para legislator dapat berperan serta dan memantaunya untuk membantu memastikan struktur ini berjalan dengan efektif.

Apa yang harus diketahui legislator tentang struktur tatakelola EITI?

Struktur tatakelola bervariasi dari satu negara ke negara lain, namun sebuah panitia pengarah lintas pemangku kepentingan harus mengawasi program ini, dan seorang pejabat pemerintah senior harus memimpinya. Beberapa negara juga telah membentuk struktur tambahan, seperti digambarkan di bawah ini, untuk memperluas masukan pemangku kepentingan atau memberikan pengawasan tambahan. Dengan menjadi terinformasi mengenai bagaimana EITI dikelola dan oleh siapa, para legislator dapat mengenali bagaimana cara terbaik untuk berperan serta dan mempengaruhi program EITI di negara mereka.

Studi Kasus 3

Para legislator memiliki kursi dalam MSG di empat dari 24 negara kandidat EITI:

Para legislator memiliki kursi dalam MSG di empat dari 24 negara kandidat EITI:

- **Kazakhstan:** *National Stakeholder's Council* termasuk tiga legislator.
- Yaman: EITI Council termasuk satu legislator, yang merupakan seorang anggota Komisi Minyak dan Pembangunan.
- Mauritania: masing-masing dari empat legislator dalam MSG berasal dari partai berbeda dengan perwakilan di parlemen.
- Nigeria: Dalam putaran pertama EITI, dua orang anggota Majelis Nasional dan dua legislator tingkat negara bagian duduk di *National Stakeholder Working Group*.

■ *Kelompok kerja lintas pemangku kepentingan*

Kelompok kerja lintas pemangku kepentingan (*multi-stakeholder working group, MSG*)⁷ adalah sebuah komite terdiri atas wakil-wakil masyarakat sipil, lembaga pemerintah, dan perusahaan yang bekerja dalam kemitraan untuk membuat keputusan tentang desain, pemantauan, dan evaluasi EITI. Ini merupakan badan pembuatan keputusan inti dalam program EITI. Jumlah anggota MSG dan siapa yang mereka wakili berbeda-beda di setiap negara, namun *Box 2* menyajikan daftar dari anggota-anggota yang mungkin dicakup. Keanggotaan MSG harus cukup kecil untuk dapat bekerja dengan efisien, namun cukup besar supaya dapat mewakili semua pemangku kepentingan.

Tanggung jawab MSG bervariasi, namun sebuah analisis mutakhir⁸ tentang negara-negara EITI menunjukkan kebanyakan MSG melakukan sebagian atau semua hal berikut ini:

- Menentukan suatu strategi negara EITI keseluruhan;
- Memilih cakupan EITI (Lihat *Bab V*)
- Menyusun, menyetujui, dan memantau kemajuan Rencana Kerja EITI (Lihat *Bab V*);
- Menunjuk dan mengelola administrator independen;
- Membantu membuat keputusan-keputusan tentang kerangka pelaporan (Lihat *Bab V*);
- Meningkatkan kesadaran publik tentang EITI, kerap dilakukan dengan menyebarkan laporan EITI (Lihat *Bab VIII*); dan
- Membantu mengidentifikasi dan menghilangkan kendala-kendala bagi implementasi.

■ *Sekretariat EITI atau Unit Implementasi*

EITI mensyaratkan bahwa, pada tingkat minimum, pemerintah menunjuk seorang pejabat pemerintah senior (seringkali seorang Menteri) untuk memimpin implementasi EITI. Pejabat senior ini harus memiliki pangkat yang memadai untuk dapat memecahkan kendala-kendala birokratis bagi EITI ketika muncul. Kebanyakan negara EITI menjalankan sebuah sekretariat nasional yang berdedikasi yang untuknya disediakan staf administratif, komunikasi, atau pakar industri ekstraktif. Biasanya kantornya terdapat pada badan atau departemen pemerintah tertentu. Di Peru, misalnya, sekretariat EITI berkedudukan

Studi Kasus 4

Workshop Lintas Pemangku Kepentingan Zambia

Para legislator harus berusaha terlibat dalam EITI sejak awal prosesnya. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan berpartisipasi dalam workshop lintas pemangku kepentingan yang diadakan pada tahap-tahap perencanaan awal EITI. Zambia, misalnya, menyelenggarakan sebuah workshop serupa sesaat sesudah mengumumkan rencananya untuk bergabung dengan EITI. Workshop tersebut memberikan ruang bagi perusahaan, masyarakat sipil, anggota parlemen, dan pemerintah untuk membahas struktur dari Dewan EITI yang akan datang, dan bagaimana untuk maju dengan proses EITI. Y.M. Given Lubinda, Ketua Komisi Ekonomi dan Perencanaan, menghadiri workshop tersebut, dan membahas pentingnya keterlibatan legislatif dalam EITI.

Source : <http://go.worldbank.org/UD915M8920>

di Departemen Energi dan Tambang; di Kamerun, sekretariatnya berlokasi di dalam Departemen Perekonomian dan Keuangan. Terakhir, sejumlah negara juga telah membentuk kelompok kerja lintas pemerintah untuk mengkoordinasikan partisipasi pemerintah.

7 Di beberapa negara, MSG disebut sebagai kelompok kerja, panitia pengarah, dewan, atau komisi EITI. Ini bervariasi antarnegara.

8 *Implementing EITI: Applying Early Lessons from the Field*, hal. 20-21, World Bank, 2008.

■ *Mekanisme Masukan Lainnya*

Beberapa negara telah menciptakan mekanisme tambahan untuk memfasilitasi masukan yang lebih luas. Konferensi-konferensi nasional EITI mengumpulkan perorangan dan organisasi yang tidak secara formal berada dalam MSG untuk berbagi pandangan. Masyarakat sipil dan dunia usaha juga telah membentuk kelompok-kelompok konstituensi, yang memiliki wakil-wakil yang duduk di MSG. Mereka bertemu untuk membahas keputusan-keputusan EITI dan wakil-wakil mereka berbagi pandangan kelompok tersebut dalam MSG.

Diagram 2 : **Struktur Tatakelola EITI Ghana**



Apakah legislator duduk dalam MSG? Apa keuntungan melakukannya?

EITI tidak menuntut legislator menjadi anggota MSG, namun di beberapa negara (Lihat *Studi Kasus 3*) ketua atau anggota dari komisi yang relevan (misalnya, anggaran, keuangan, perencanaan, sumberdaya alam, pinjaman publik) duduk dalam lembaga ini, untuk meningkatkan kontribusi lembaga legislatif pada EITI dengan berbagai cara. Keanggotaan legislatif dalam MSG:

- *Memungkinkan pemantauan legislatif yang lebih mudah atas EITI*
Anggota-anggota komisi bertanggung jawab untuk mengetahui industri atau isu-isu yang diawasi oleh komisi mereka. Memiliki kursi dalam MSG, menghadiri pertemuan-pertemuan, dan memberikan masukan membantu legislator memonitor kemajuan, capaian, dan masalah-masalah EITI.
- *Mendorong komunikasi legislatif-eksekutif yang membaik*
Komunikasi yang jarang dan tidak efektif antara cabang legislatif dan eksekutif dapat melemahkan kemampuan lembaga legislatif untuk melakukan pengawasan. EITI menyediakan suatu proses yang terstruktur untuk memfasilitasi proses berbagi informasi oleh pemerintah dengan semua pihak.

Box 5

Sumber-Sumber Potensial untuk Kepakaran EITI

- Anggota-anggota Publish What You Pay (PWYP)
- LSM yang aktif dalam isu-isu industri ekstraktif
- Staf komisi atau staf parlemen lainnya
- Layanan riset parlemen, bila ada
- Organisasi donor internasional
- Pejabat eksekutif atau departemen yang relevan
- Wakil-wakil perusahaan
- Lembaga akademis
- Staf kantor Bank Dunia di negara yang bersangkutan
- Sekretariat nasional EITI
- Anggota-anggota MSG

Bergabung dengan MSG EITI

Legislator dapat memperoleh kursi dalam MSG EITI dengan sejumlah cara. Pimpinan legislatif atau ketua komisi yang relevan dapat mengirimkan sepucuk surat permintaan kepada kepala MSG atau Sekretariat EITI atau kepada pejabat badan tingkat tinggi. Dalam beberapa kasus, pemerintah mungkin perlu diyakinkan, dan menggunakan media serta mengkoordinasikan upaya advokasi dengan LSM, mungkin satu strategi lain yang berguna.

Di kasus lain, keanggotaan legislatif mungkin diprakarsai oleh pemerintah. Di Yaman, para legislator semula tidak termasuk dalam MSG. Namun, setahun setelah pembentukannya secara resmi, Dewan EITI mengirim surat undangan formal meminta parlemen menunjuk seorang legislator untuk menjadi anggota.

- *Menciptakan kesempatan untuk membangun hubungan*
MSG mengumpulkan aktor yang sangat beragam untuk berbagi pandangan dan kepakaran mereka, dan membuat keputusan berdasarkan mufakat. Berperan serta dalam MSG dapat memfasilitasi hubungan antara aktor-aktor ini, yang kemudian dapat digunakan legislator untuk memainkan pengaruh ketika mendorong agenda-agenda industri ekstraktif yang lebih luas atau anti-korupsi.
- *Mempromosikan kepakaran dan kepemimpinan legislatif yang lebih besar dalam industri ekstraktif*
Melalui partisipasi langsung dalam MSG para legislator dapat mengambil manfaat dari kepakaran dalam bidang industri ekstraktif dan transparansi dari aktor-aktor MSG lainnya. Dalam melaporkan kepada koleganya, dan membahas EITI di media, para legislator dapat menjadikan dirinya sendiri sebagai pemimpin yang kredibel dalam isu ini.

Box 6

Catatan tentang Pengaturan Waktu EITI

Waktu yang diperlukan bagi sebuah program EITI untuk mengeluarkan laporan pertamanya tergantung pada banyak faktor, termasuk cakupan program, pendanaan, dan keadaan politik negara yang bersangkutan. Di 10 negara yang telah mengeluarkan sebuah laporan, proses ini makan waktu 18-24 bulan.

Bagaimana legislator dapat memonitor dengan sebaik-baiknya kegiatan dari MSG?

Apakah legislator duduk dalam MSG atau tidak, keterlibatan dalam EITI secara keseluruhan lebih cenderung efektif ketika mereka tetap terinformasi dengan kegiatan-kegiatan MSG. Paragraf-paragraf berikut berbagi sejumlah strategi agar tetap terinformasi dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu diajukan.

- *Tahu bagaimana MSG bekerja*
Legislator harus bertanya tentang siapa yang membentuk MSG? Bagaimana anggotanya dipilih? Apakah anggota mewakili serangkaian pemangku kepentingan yang luas dan apakah di dalamnya termasuk paling tidak pejabat senior perusahaan, masyarakat sipil, dan pemerintah? Kantor pemerintah yang mana yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan EITI? Apakah ada sekretariat nasional yang terpisah? Bagaimana jadwal pertemuan-pertemuan MSG?

■ *Bangun komunikasi sejak awal*

Semakin awal para legislator membangun mekanisme komunikasi dengan sekretariat nasional EITI dan MSG, semakin baik mereka akan terinformasi. Komisi-Komisi dapat meminta salinan dari rencana kerja EITI dan pengarahannya teratur oleh pejabat pemerintah EITI senior atau ketua MSG. Dalam kasus-kasus di mana seorang ketua komisi atau anggota duduk di MSG, dia harus memberikan informasi kepada koleganya tentang perkembangan dan masalah-masalah EITI.

■ *Mempromosikan keterlibatan penuh dari masyarakat sipil dan perusahaan dalam MSG*

Program-program EITI paling berhasil ketika semua pemangku kepentingan non-pemerintah dapat berpartisipasi penuh. Namun kadang-kadang ada kendala-kendala yang ingin dipantau oleh para legislator dan mereka mendorong agar ditangani oleh pemerintah. Aktor-aktor non-pemerintah harus independen dari pemerintah, dan bebas untuk mengekspresikan dirinya. Wakil-wakil masyarakat sipil yang tinggal di luar ibukota mungkin kesulitan untuk melakukan perjalanan dan hadir dalam pertemuan-pertemuan di ibukota tanpa pemberitahuan sebelumnya atau tanpa adanya dana untuk biaya perjalanan. Bila pemerintah berkomunikasi secara buruk dengan perusahaan-perusahaan tentang peran mereka dalam MSG mereka mungkin salah memahami apa yang diminta.

Membentuk Program EITI



Bab V.

Sebuah program EITI dirancang dan dibentuk pada bagian awal dalam proses. Bab V membahas beberapa dari keputusan yang harus dibuat negara-negara ketika merancang program EITI mereka dan menyarankan sejumlah cara bagaimana lembaga legislatif dapat memberikan sumbangannya.

Apa isu-isu utama yang dipertimbangkan dalam sebuah program EITI?

Dalam membentuk program EITI, pertanyaan-pertanyaan kunci yang diajukan termasuk:

Bagaimana partisipasi perusahaan seharusnya ditentukan? EITI mensyaratkan bahwa semua perusahaan, baik yang swasta maupun milik negara, memasukkan laporan.

Bagaimana seharusnya level materialitas dari jenis-jenis pembayaran (pajak, royalti, dll.)? EITI mensyaratkan bahwa semua pembayaran “material” dicakup. Namun, negara-negara dapat menentukan bahwa pembayaran-pembayaran tertentu, berdasar pada suatu ambang yang ditentukan, tidak perlu dimasukkan karena biaya dan waktu yang akan diperlukan untuk memperoleh datanya.

Seharusnya hasilnya dilaporkan dalam bentuk angka-angka teragregasi (disatukan) atau terdisagregasi (dipilah)? EITI membolehkan setiap program untuk memutuskan apakah sebuah laporan akan berisi angka-angka pembayaran dan penerimaan sebagai bilangan teragregasi, atau terpilah-pilah berdasarkan perusahaan, terpisah berdasarkan jenis pembayaran, atau keduanya. Saat ini, semua program EITI memilah data berdasarkan jenis pembayaran, namun hanya laporan dari Ghana, Guinea, Mongolia, dan Nigeria yang juga telah memilahnya berdasarkan perusahaan.⁹ Laporan-laporan dengan data terpilah cenderung lebih informatif, dan transparansi yang lebih besar melalui disagregasi bisa membawa kepercayaan lebih besar di kalangan pemangku kepentingan.¹⁰

9 *Drilling Down*, hal. 148, Revenue Watch Institute, 2008 dan *EITI Mongolia 2006 Report*, dirilis Februari 2008 (Tersedia di: <http://eitimongolia.mn>)

10 *Implementing EITI: Early Lessons Learned from the Field*, hal. 33, World Bank, 2008.

Studi Kasus 6

Membentuk EITI di Mongolia

Mongolia bergabung dengan EITI pada 2005, dan mengeluarkan laporan pertamanya pada Februari 2008. Dewan EITI memilih untuk dapat dilakukannya rekonsiliasi menggunakan data yang sudah diaudit sebelumnya serta untuk dipilah, baik berdasarkan pembayaran maupun perusahaan.

Dewan EITI juga memilih untuk menentukan sebuah ambang bagi pelaporan perusahaan. Industri pertambangan Mongolia cukup besar, dengan kira-kira 350 perusahaan. Beberapa anggota Dewan EITI memandang penting untuk memasukkan semua perusahaan sehingga bisa memastikan bahwa laporannya menyeluruh. Pihak lain merasa khawatir bahwa meminta begitu banyak perusahaan untuk memasukkan laporan akan makan waktu begitu lama sehingga kredibilitas program EITI akan tergerogoti, dan akan menjadi terlalu mahal.

Dewan EITI memilih untuk memasukkan 25 perusahaan terbesar, dan perusahaan yang memberikan kontribusi setidaknya 200,000,000 Tugrug pada 2006. Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan ini memberikan kontribusi pada hampir semua dari penerimaan pertambangan total (satu perusahaan, sebagai contoh, memberikan kontribusi lebih dari 80% penerimaan pertambangan).

Studi Kasus 7

Contoh-Contoh Tambahan tentang Materialitas

Program EITI **Ghana** memilih untuk memasukkan pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh delapan perusahaan yang memberikan kontribusi 99 persen dari royalti.

Nigeria mensyaratkan semua perusahaan untuk melaporkan pembayaran pajak, royalti, dan bagian yang mereka lakukan.

Guinea mendefinisikan materialitas untuk hanya memasukkan pembayaran-pembayaran dari enam perusahaan pertambangan terbesar.

Sumber : *Drilling Down*, Revenue Watch Institute, 2008.

Box 7

Apa yang Harus Dilakukan bila Data Sebelumnya Belum Diaudit

EITI mensyaratkan bahwa semua data pembayaran perusahaan dan penerimaan negara diaudit menurut standar internasional. Ini membantu untuk memastikan bahwa data yang direkonsiliasikan dapat diandalkan. Bagaimanapun, bila data belum diaudit menurut standar internasional sebelumnya, program EITI perlu mencakup sebuah audit, ketimbang rekonsiliasi si.

Di mana keputusan-keputusan cakupan akan tercermin?

Keputusan-keputusan tentang cakupan program EITI suatu negara akan dicerminkan dan dibentuk oleh tiga dokumen penting: rencana kerja EITI; kerangka pelaporan EITI; dan Kerangka Acuan administrator EITI. Ketiga dokumen dijelaskan dalam panduan Bank Dunia *Implementing EITI: Applying Early Lessons from the Field* (Lihat Lampiran C: Daftar Sumber Bacaan Tambahan). Rencana kerja EITI berfungsi sebagai "peta jalan" bagi implementasi EITI, dan harus disetujui oleh MSG dan dibuat tersedia bagi publik. Dokumen ini harus merumuskan tujuan-tujuan program, menetapkan kerangka waktu, memberikan indikasi berapa banyak biaya dari kegiatan yang akan dilakukan, dan meninjau kendala-kendala apapun terkait kapasitas dari mereka yang akan berpartisipasi. Kerangka pelaporan EITI adalah sebuah kuesioner standar yang digunakan untuk mengumpulkan data pembayaran dari masing-masing entitas pelapor (pemerintah atau perusahaan). Kerangka Acuan bagi administrator independen¹¹ harus mendefinisikan dengan persis bagaimana mereka akan menjalankan tanggung jawab mereka, termasuk informasi apa yang akan mereka masukkan dalam laporan.

11 Peran dari administrator independen adalah untuk mengumpulkan data yang dilaporkan melalui kerangka pelaporan, merekonsiliasikannya, dan mengasihkan sebuah laporan tentang hasilnya.

Bagaimana legislator memastikan EITI mengikuti rencana kerja yang disepakati?

Dalam tahapan-tahapan awal EITI ini, para legislator, entah anggota MSG atau bukan, dapat membantu menjamin efektivitas proses dengan memonitor apakah mengikuti rencana kerja yang disepakati.

- *Mendorong pemerintah dan MSG untuk menghilangkan kendala-kendala implementasi*
Klausula kerahasiaan, kadang-kadang tercantum dalam kontrak antara perusahaan dan pemerintah, dapat menjadi kendala dalam implementasi. Kegagalan untuk menghilangkannya dapat menghambat proses EITI, menggagalkannya, atau membuat upaya ini tidak efektif. Para legislator harus mendorong pemerintah untuk membebaskan perusahaan-perusahaan dari kewajiban menjaga kerahasiaan ini. Kendala umum lainnya adalah hukum perpajakan yang menghalangi pemerintah mengeluarkan informasi pajak perusahaan kepada pihak ketiga. Ini merupakan contoh lain di mana pemerintah dapat mengubah undang-undang, bila diperlukan, agar EITI dapat berjalan.
- *Mendorong pemerintah untuk mengatasi keterlambatan*
Para legislator mungkin dapat mengurangi keterlambatan dalam implementasi EITI, dan memastikan kekurangan pendanaan tidak serta-merta mengganggu proses. Para legislator dapat membantu menangani sebab-sebab penundaan apapun dan mendorong pemerintah untuk teguh pada rencana kerja yang sudah disepakati melalui sesi pertanyaan parlemen kepada pemerintah, dan melalui pertemuan-pertemuan informal dengan pejabat-pejabat pemerintah yang terlibat dalam EITI serta wakil-wakil perusahaan. Para legislator juga dapat membantu memastikan bahwa pendanaan dicairkan dalam kerangka waktu seperti yang diletakkan dalam rencana kerja.
- *Meminta pengarahan EITI yang dijadualkan teratur*
Komisi dapat meminta pejabat pemerintah senior EITI untuk memberikan pengarahan EITI dengan jadual yang teratur. Anggota-anggota komisi akan perlu menentukan seberapa sering pengarahan ini harus dilakukan untuk memastikan pertukaran informasi yang efektif. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan termasuk lamanya sidang legislatif dan acara-acara atau isu-isu non-EITI yang mendesak.
- *Meminta laporan kemajuan dari administrator untuk disampaikan kepada lembaga legislatif*
MSG dapat meminta administrator menyediakan laporan kemajuan kepada MSG secara periodik. Laporan kemajuan mungkin dapat menemukenali masalah-masalah sejak awal dalam prosesnya. Termasuk di dalamnya kemungkinan adalah, tindakan-tindakan apa yang telah diambil sampai saat ini, kepada perusahaan dan entitas pemerintah yang mana kerangka pelaporan telah dikirim, perusahaan atau entitas yang mana yang telah melengkapinya, dan tugas-tugas yang masih harus dilakukan.
- *Meminta pengiriman otomatis dari dokumen EITI yang terbuka untuk publik*
Kebanyakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses EITI harus terbuka untuk publik. Ini termasuk rencana kerja EITI, MoU yang ditandatangani antara pemerintah dan MSG; kerangka pelaporan EITI, dan MoU yang ditandatangani oleh administrator. Komisi dapat meminta agar mereka dikirim, sebagai sebuah praktek yang standar, salinan dari semua dokumen EITI yang relevan.

Box 8

Memaksimalkan Manfaat dari Pengarahan EITI

- Ingat bahwa maksud utama dari pengarahan adalah untuk mengumpulkan informasi ketimbang mengkritisi kebijakan.
- Pengarahan sering dapat memberikan latar belakang bagi tindakan-tindakan berikutnya atau membantu memfokuskan keterlibatan legislatif pada isu-isu kunci.
- Sesi-sesi pengarahan tidak untuk memecahkan semua masalah EITI, namun untuk memberikan lebih banyak informasi tentang suatu isu spesifik.
- Pembicara dalam pengarahan adalah wakil-wakil dari organisasi atau lembaga, namun mereka mungkin tidak dapat menjawab semua pertanyaan, khususnya terkait kebijakan atau tindakan di masa depan.

Box 9

Pilihan-Pilihan Ketika Pemerintah Tidak Tanggap terhadap Permintaan akan Informasi EITI

- Gunakan tekanan melalui kaukus partai politik
- Dorong isu-isu tersebut melalui sarana yang dimiliki komisi (dengar pendapat, investigasi, laporan-laporan komisi)
- Susun sebuah surat protes terbuka (tembusi Bank Dunia, lembaga donor lain yang terkait, dan media)
- Dokumentasikan kurangnya tanggapan ini dan kumpulkan dukungan dari masyarakat sipil dan masyarakat internasional

Menganalisis dan Memperbaiki Laporan dan Proses EITI



Bab VI.

Keberhasilan dari program EITI terletak pada kualitas dan kelengkapan laporan EITI. Bab VI menggambarkan laporan dan proses yang menghasilkannya, serta menyarankan sejumlah cara di mana legislator dapat membantu meningkatkan kualitasnya.

Bagaimana proses pelaporannya berjalan?

Administrator EITI mengirimkan kerangka laporan kepada masing-masing perusahaan dan badan pemerintah dalam cakupan program. Perusahaan dan badan pemerintah melengkapi kerangka laporan ini, dan mengirimkannya kembali kepada administrator, yang kemudian merekonsiliasi angka-angkanya, dan menyajikannya dalam laporan rekonsiliasi EITI. Dalam beberapa kasus, administrator dapat meminta informasi tambahan. Semua hasil rekonsiliasi dijelaskan dalam laporan EITI final.

Studi Kasus 8

Menghadiri sebuah Workshop tentang Laporan EITI di Ghana

Program EITI Ghana mengeluarkan laporan pertamanya pada Februari 2007. Pada Juni 2007, Departemen Keuangan dan Perencanaan Ekonomi (MOFEP: Ministry of Finance and Economic Planning) dan Panitia Pengarah Nasional EITI (NSC: National Steering Committee) mengadakan sebuah workshop bagi anggota dari Panitia Khusus Parlemen tentang Tambang. Maksud dari workshop ini adalah untuk menyajikan hasil-hasil dari laporan tersebut kepada para anggota Parlemen, membahas Prakarsa EITI, dan mulai membahas undang-undang EITI.

Seharusnya Seperti Apa Laporan EITI Itu?

Susunan dan isi laporan EITI akan tergantung pada keputusan-keputusan MSG mengenai program tersebut, seperti tercermin dalam rencana kerja dan Kerangka Acuan administrator (Lihat *Bab V: Membentuk Program EITI*). Minimal, setiap laporan EITI harus menjelaskan bagaimana ia telah memenuhi persyaratan EITI¹², dan harus mengungkap hal-hal berikut:

- *Penerimaan dan pembayaran material*
Laporan ini harus menyatakan pembayaran material dan penerimaan material yang mana yang diungkap dan dicakup dalam laporan. Semua perusahaan yang dimasukkan (sesuai dengan rencana kerja MSG) dan semua badan pemerintah harus terdaftar. Laporan tersebut juga harus menjelaskan bagaimana “materialitas” didefinisikan untuk aliran-aliran penerimaan, perusahaan dan badan pemerintah yang tercakup.
- *Perbedaan*
Menurut kriteria Validasi, laporan harus mengidentifikasi perbedaan antara apa yang dilaporkan perusahaan-perusahaan sebagai mereka bayarkan dengan apa yang dilaporkan oleh badan-badan pemerintah mengenai yang telah mereka terima. Laporan ini harus mendaftar semua perusahaan dan badan pemerintah yang tidak melapor pada administrator.
- *Rekomendasi*
Terakhir, EITI mensyaratkan bahwa laporan ini mencakup rekomendasi-rekomendasi bagi penguatan proses EITI. Rekomendasi semacam itu mungkin memasukkan perbaikan-perbaikan dalam integritas sistem keuangan dan penyimpanan catatan perusahaan serta praktek-praktek akuntansi, atau klarifikasi terkait undang-undang dan peraturan yang berhubungan, yang dapat meningkatkan kepatuhan.

Studi Kasus 9

Contoh-Contoh Masalah dalam Suatu Laporan EITI: Mongolia

Masalah-masalah paling umum yang diidentifikasi dalam laporan-laporan EITI adalah bahwa beberapa perusahaan tidak melapor, atau melaporkan informasi yang tidak akurat; perusahaan-perusahaan salah memahami apa yang diminta dari mereka untuk dilaporkan; badan pemerintah tidak melapor, serta keterlambatan-keterlambatan dalam prosesnya. Masalah-masalah ini sangat jamak dalam laporan pertama di masing-masing negara.

Sebagai contoh, laporan EITI pertama Mongolia mengidentifikasi isu-isu berikut ini:

- Data pemerintah yang tidak lengkap: Beberapa badan pemerintah memasukkan kembali kerangka laporan dengan informasi yang tidak lengkap; beberapa bahkan tidak melapor sama sekali.
- Pelaporan yang tidak lengkap oleh perusahaan: Laporan mencatat bahwa banyak perusahaan tampaknya salah memahami pembayaran-pembayaran apa yang perlu dilaporkan.
- Adanya inkonsistensi dalam cara departemen pemerintah dan perusahaan melaporkan pembayaran yang sama: Beberapa perusahaan, sebagai contoh, memasukkan PPN dan kewajiban bea dalam angka untuk kewajiban bea.
- Keterlambatan dalam proses: administrator mencatat bahwa keterlambatan dalam implementasi menyisakan waktu terlalu sedikit bagi badan pemerintah dan perusahaan untuk merespon permintaan informasi dari administrator.

Sumber: *Report on First Mongolian Reconciliation*, dapat dilihat di: <http://eitimongolia.mn/>

12 *EITI Validation Guide*, hal. 10, Extractive Industries Transparency Initiative, 2006. (Lihat *Lampiran C: Daftar Sumber Bacaan Tambahan*)

Apa yang Harus Dilakukan Legislator untuk Mendorong Perbaikan dalam Laporan dan Proses EITI?

Tergantung pada piranti dan kewenangan pengawasan yang dimiliki badan legislatif dan komisi-komisinya, mereka dapat mempunyai beberapa pilihan untuk menangani kelemahan-kelemahan laporan. Para legislator dapat:

- *Bertemu dengan administrator dan dengan LSM untuk membahas temuan-temuan laporan*
Segera setelah laporan dirilis, para legislator harus meminta administrator menjelaskan temuan-temuannya. Mereka juga bisa meminta LSM yang aktif dalam EITI untuk berbagi analisisnya.
- *Mengadakan dengar pendapat publik tentang temuan-temuan laporan*
Dengar pendapat publik dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang temuan-temuan laporan EITI, mendapatkan masukan mengenai cara-cara untuk memperbaiki proses EITI, dan meningkatkan kesadaran publik tentang EITI (Lihat *Bab VIII: Mengkomunikasikan Laporan EITI*).
- *Membentuk panitia khusus (investigatif) untuk memeriksa perbedaan atau masalah yang besar*
Bila masalah-masalah yang diidentifikasi serius dan tidak ditangani oleh pemerintah, panitia khusus bisa menjadi cara yang efektif untuk memperjelas masalahnya. Panitia khusus adalah komisi sementara yang dibentuk untuk memeriksa isu tertentu dan dapat memberikan efek pencegahan terhadap korupsi.
- *Mengeluarkan laporan komisi yang menyoroti bidang-bidang yang perlu mendapat tindakan pemerintah*
Laporan komisi menyampaikan kepada pemerintah dan publik analisis komisi tentang suatu isu atau program tertentu dengan rekomendasi untuk dilakukannya tindakan. Sebuah laporan komisi tentang EITI mungkin menyorot rekomendasi-rekomendasi yang dimasukkan dalam laporan EITI namun belum ditindaklanjuti oleh pemerintah, atau memintakan perhatian pada tindakan pemerintah atau kurangnya tindakan pemerintah dalam merekonsiliasi perbedaan yang diungkap dalam laporan EITI.
- *Mendesak dilakukannya tindakan oleh pemerintah melalui pengajuan pertanyaan parlemen kepada pemerintah (parliamentary questions)*
Pertanyaan parlemen secara lisan ataupun tertulis lazimnya merupakan kesempatan yang dijadualkan teratur bagi legislator perorangan untuk mengajukan pertanyaan kepada pimpinan eksekutif untuk mendapat jawaban lisan.
- *Meminta dilakukannya audit*
Ketika perbedaan atau masalah lain diidentifikasi, meminta dilakukannya sebuah audit tambahan mungkin menjadi satu-satunya cara untuk memeriksa kenapa ini terjadi. Di beberapa negara, komisi-komisi legislatif dapat memiliki kewenangan untuk meminta pemerintah melakukan audit serupa untuk memecahkan masalah-masalah luar biasa.

Box 10

Pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan ketika meninjau laporan EITI

- Total, berapa banyak yang telah diperoleh pemerintah?
- Berapa banyak yang diperoleh dari pajak, royalti, dan kategori-kategori lainnya?
- Apakah pembayaran-pembayaran yang dilaporkan sebagai dibayarkan oleh perusahaan cocok dengan penerimaan yang dilaporkan oleh pemerintah?
- Apakah semua arus uang material terekonsiliasi?
- Bagaimana dengan minyak yang dikonversi ke uang dan dengan harga berapa pemerintah dibayar?
- Apakah terdapat perbedaan?
- Apakah laporannya memenuhi standar yang disepakati oleh MSG?
- Apakah laporannya memenuhi kriteria EITI?
- Rekomendasi apa yang telah dibuat dalam laporan ini?
- Periode waktu kapan yang dicakup dalam laporan ini?

Lihat juga: Lampiran B: *Ringkasan Strategi-Strategi Legislatif*.

Sumber: *Drilling Down*, hal. 80, Revenue Watch Institute, 2008.

Mengkomunikasikan Laporan EITI



Bab VII.

Salah satu manfaat terpenting EITI adalah bahwa EITI menyediakan informasi tentang penerimaan industri ekstraktif untuk publik. Bagaimana legislator dapat membantu dalam proses ini? Bab VII memberikan beberapa saran spesifik.

Mengapa komunikasi penting dalam suatu program EITI?

Komunikasi adalah bagian yang esensial untuk keberhasilan EITI. Pemerintah, perusahaan, organisasi masyarakat sipil, legislator, dan warga sendiri harus memahami dan mendukung program ini. Ini mensyaratkan tersedia dan dapat dipahaminya informasi EITI kunci bagi semua aktor, dan ini semua membutuhkan komunikasi yang efektif.

Komunikasi EITI harus memadukan sejumlah piranti yang berbeda, dijalankan oleh beragam pemangku kepentingan, dan terjadi secara kerap sepanjang proses EITI. Strategi-strategi komunikasi yang digunakan berbeda-beda antarnegara, namun yang paling umum adalah, termasuk mempublikasikan laporan EITI di situs web dan membuat versi cetaknya tersedia. *Talking Transparency: A Guide for Communicating EITI* memberikan informasi tentang beberapa dari strategi-strategi yang lebih menyeluruh (Lihat *Lampiran C: Daftar Sumber Bacaan Tambahan*).

Box 11

Berkomunikasi secara *Online*: Beberapa Situs Web EITI Internasional dan Nasional

Sites Web EITI Internasional:
<http://www.eiti.org>

Pemerintah Azerbaijan (dalam bahasa Inggris dan Azerbaijan): <http://www.oilfund.az/>

Pemerintah Gabon (dalam bahasa Perancis): <http://www.eitigabon.org/FRAN/index.htm>

Pemerintah Ghana (dalam bahasa Inggris): <http://www.geiti.gov.gh>

Pemerintah Guinea (dalam bahasa Perancis): <http://www.guinee.gov.gn/itieg.php>

Pemerintah Kazakhstan (dalam bahasa Rusia, dengan beberapa isinya dalam bahasa Kazakh dan Inggris): <http://www.eiti.kz>

Pemerintah Liberia:
<http://eitiliberia.org/>

Pemerintah Mauritania:
<http://www.mauritania.mr/itie/>

Pemerintah Mongolia (dalam bahasa Mongolia dan Inggris): <http://eitimongolia.mn/>

Pemerintah Nigeria:
<http://www.neiti.org/>

Pemerintah Peru: (dalam bahasa Spanyol): <http://www.minem.gob.pe/eiti/default.asp>

Pemerintah Equatorial Guinea (dalam bahasa Perancis): <http://www.republicofequatorialguinea.net/Initiatives/?PageID=127>

Pemerintah Cameroon (dalam bahasa Perancis): <http://www.spm.gov.cm/showdoc.php?txtrech=eiti&lang=fr&button=ok>

Mengapa hasil-hasil dalam laporan EITI penting dikomunikasikan?

Tidak peduli seberapa berhasilnya program EITI, bila laporannya tidak dirilis untuk publik dan disebarluaskan, ini akan gagal untuk memenuhi tujuannya. EITI mensyaratkan bahwa laporannya dibuat tersedia untuk publik, dan bahwa laporannya menyeluruh serta dapat dipahami.¹³ Warga harus dapat mengakses laporan tersebut, dan harus dapat memahaminya.

Mengapa legislator harus membantu mengkomunikasikan EITI?

Legislator memiliki posisi yang unik untuk membantu mengkomunikasikan hasil-hasil EITI melalui kegiatan-kegiatan penjangkauan publik. Banyak dari mereka telah memiliki pengalaman bekerja dengan media dan melibatkan warga, dan telah sering menggunakan beragam mekanisme untuk melakukannya. Mereka juga mungkin memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana perasaan warga tentang transparansi industri ekstraktif, dan apa yang paling menarik untuk mereka ketahui. Baik sebagai anggota komisi, fraksi partai politik, atau secara perorangan, legislator mewakili konstituen, legislator dapat membuat kegiatan penjangkauan publik untuk mendidik warga tentang EITI dan mendapatkan umpan balik mereka. Legislator dan partai politik yang mengkomunikasikan EITI dapat mampu mempertontonkan kepemimpinan mereka dalam isu ini, dan memperlihatkan bahwa mereka tanggap dan peduli dengan kebutuhan warga.

Apa tujuan-tujuan dari membagi hasil-hasil laporan EITI?

Legislator biasanya memiliki dua tujuan dalam membagi informasi EITI kepada publik. 1) mendidik masyarakat tentang pentingnya EITI dan laporan EITI; atau 2) menarik perhatian ke masalah-masalah dalam laporan yang perlu ditangani pemerintah. Bila tujuannya adalah menyoroti kelemahan-kelemahan dalam laporan, legislator mungkin ingin menekankan isu-isu yang paling penting dan mengkomunikasikannya dengan jelas. Ketika memilih apa yang akan disorot, legislator dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

- Isu-isu apa yang paling menjadi keprihatinan warga?
- Bila isu-isu tersebut terselesaikan, apa yang akan dilakukan untuk semakin meningkatkan EITI dan transparansi?
- Apa yang bisa dilakukan pemerintah tentang masalah-masalah yang diidentifikasi? Apa yang harus dilakukannya?
- Apa yang dipikirkan oleh anggota MSG tentang isu-isu yang paling penting?
- Apa yang dipercayai oleh LSM yang aktif dalam EITI sebagai isu-isu yang paling penting untuk ditangani?
- Apa isu-isu paling penting untuk partai? Bagaimana EITI dan isu-isu transparansi lainnya berkesesuaian dengan platform partai?

Ketika memutuskan kapan dan bagaimana berkomunikasi dengan publik, legislator harus yakin untuk mempertimbangkan apakah pemerintah telah berupaya untuk menyelesaikan isu-isu yang bersangkutan. Tujuannya adalah memastikan bahwa masalahnya terselesaikan, dan bahwa laporannya setransparan mungkin.

13 *EITI Validation Guide, Extractive Industries Transparency Initiative, 2006. (Lihat Lampiran C: Daftar Sumber Bacaan Tambahan).*

Apa pendekatan-pendekatan untuk mengkomunikasikan tentang EITI?

Legislator memiliki beberapa pendekatan yang mungkin dilakukan untuk mengkomunikasikan temuan-temuan dalam laporan EITI. Paragraf-paragraf berikut menggambarkan beberapa di antaranya.

■ *Berkoordinasi dengan sekretariat nasional EITI*

EITI mensyaratkan laporannya dipublikasikan. Kebanyakan sekretariat EITI telah, paling tidak, membuat sebuah situs web publik (Lihat Box 11) dan menaruh laporannya secara online. Beberapa program EITI menciptakan strategi-strategi komunikasi formal, yang memasukkan serangkaian pendekatan untuk mempublikasikan laporannya. Legislator mungkin ingin mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penjangkauan mereka dengan yang diadakan sekretariat dengan, misalnya:

- Memberikan masukan untuk strategi komunikasi EITI;
- Menyediakan versi yang disederhanakan dari laporan EITI atau pamflet tentang proses EITI melalui bagian humas lembaga legislatif;
- Menawarkan diri berbicara pada acara untuk meluncurkan laporan EITI;
- Membantu EITI mengadakan pertemuan warga untuk menyajikan laporannya kepada publik;
- Menyebarkan laporan EITI kepada warga pada waktu kunjungan konstituensi, atau membuat salinannya tersedia di kantor konstituensi;
- Bersama menulis artikel opini dengan sekretariat nasional di surat kabar lokal untuk menekankan pentingnya transparansi kepada warga; dan
- Memberikan pengarahan kepada staf sekretariat nasional dan MSG tentang umpan balik dari warga.

Studi Kasus 10

Road Show di Nigeria

Strategi komunikasi EITI Nigeria termasuk “*Road Show*,” forum publik yang diadakan di luar ibukota untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membahas EITI. Acara ini diadakan oleh sekretariat nasional EITI di seluruh negara. Para anggota Majelis Nasional berpartisipasi dengan memimpin forum-forumnya, membuat presentasi, dan berkontribusi pada diskusinya.

■ *Melakukan penjangkauan tentang EITI melalui kegiatan-kegiatan hubungan dengan konstituen*

Legislator dan partai politik dapat memasukkan EITI ke dalam strategi-strategi hubungan konstituen dan komunikasi mereka. Legislator bersama dengan perusahaan pertambangan atau minyak yang beroperasi di wilayah konstituensi mereka, misalnya, dapat menggunakan laporan EITI sebagai piranti untuk melibatkan konstituen mereka sehingga memperlihatkan daya tanggap kepada kebutuhan lokal. Kegiatan-kegiatan terkait EITI yang mungkin bagi legislator atau partai termasuk:

- Membahas EITI di pertemuan warga; mengundang administrator atau staf EITI untuk menjelaskan laporannya;
- Berpartisipasi dalam sebuah acara interaktif radio atau televisi untuk membahas kegiatan lembaga legislatif terkait dengan EITI;
- Memasukkan perkembangan mutakhir EITI dalam newsletter legislator atau partai politik; dan
- Melakukan survei untuk belajar lebih banyak tentang keprihatinan warga mengenai industri ekstraktif, dan tentang pengetahuan mereka mengenai EITI.

Secara umum, semakin sering kegiatan-kegiatan tersebut memungkinkan komunikasi dua arah (legislator berbagi informasi, sementara warga menyuarakan keprihatinan mereka), semakin baik. Legislator yang memahami keprihatinan konstituen yang terkait dengan EITI dapat memberikan saran-saran yang lebih terinformasi dan representatif untuk memperkuat proses EITI.

■ *Melakukan penjangkauan berbasis komisi tentang EITI*

Komisi dengan yurisdiksi departemen yang bertanggung jawab untuk industri-industri ekstraktif, atau untuk transparansi pendapatan dan belanja, kemungkinan besar merupakan kendaraan legislatif utama bagi penjangkauan EITI. Komisi-komisi ini terberdayakan untuk mengumpulkan informasi EITI dari aktor-aktor yang relevan, dan berada dalam posisi terbaik untuk menjelaskan isu-isunya kepada warga. Dengar pendapat komisi yang dipublikasikan dengan baik memungkinkan warga mendengar dari pejabat publik mereka, atau dapat mengizinkan saksi-saksi dari warga, LSM, dan para pakar untuk memberikan kesaksian tentang EITI.

Legislator yang menjangkau warga tentang EITI perlu memiliki pesan yang jelas dan padat. Ketika bicara secara publik untuk mengangkat pesan tersebut, mereka perlu diberi pengarahan sepenuhnya, memiliki informasi lengkap, dan bersiap untuk membuat pernyataan melalui poin-poin yang tidak bertentangan dengan yang dibuat secara bersamaan oleh legislator lainnya (apakah dalam partai atau komisinya). Mereka harus siap untuk memberitahukan di mana orang dapat memperoleh lebih banyak lagi informasi.

Memastikan Proses Validasi yang Berhasil



Bab VIII.

Proses validasi menentukan apakah suatu negara dianggap sebagai 'compliant' EITI. Prosesnya dilakukan oleh validator luar dan independen, namun terdapat berbagai cara di mana legislator dapat memberikan kontribusi pada prosesnya. Bab ini menggambarkan beberapa di antaranya.

Apa maksud dari proses validasi?

Validasi memiliki dua maksud. Pertama, ini diadakan untuk menentukan apakah negara yang bersangkutan dianggap sebagai *Compliant* EITI. Kegagalan untuk melakukan prosesnya sesuai waktu dapat mengakibatkan hilangnya status kandidat EITI. Kedua, ini bisa dilakukan oleh negara-negara untuk mengukur kemajuan mereka dibandingkan dengan indikator-indikator prakarsa ini dan mencari rekomendasi eksternal untuk perbaikan.

Bagaimana proses validasi berjalan?

Suatu validator independen dari luar, yang dipilih oleh MSG, meninjau dokumen-dokumen EITI, melakukan wawancara dengan para pemangku kepentingan, dan mengeluarkan sebuah laporan yang menjelaskan apakah masing-masing langkah EITI ditempuh sesuai dengan standar-standar EITI. Begitu laporan validasi telah dikeluarkan, namun sebelum dirilis ke publik, MSG dan pemerintah memiliki kesempatan untuk membacanya dan menyelesaikan masalah-masalah, bila ada.¹⁴ Validasi harus dilakukan secara berkala, biasanya beberapa tahun sekali.

¹⁴ *EITI Validation Guide*, Extractive Industries Transparency Initiative, 2006.

Bagaimana legislator dapat mengawasi proses validasi?

Karena nilai pentingnya untuk proses EITI secara keseluruhan, dan potensi manfaatnya bagi lembaga legislatif sebagai sebuah piranti pengawasan pelengkap, legislator akan menghendaki untuk bisa mengawasi implementasi proses validasi.

- *Mengadakan dengar pendapat publik untuk mendorong pemerintah melaksanakan validasi*
Validasi baru dimulai hanya di sedikit negara, namun banyak yang diminta melengkapi prosesnya sampai akhir 2010 nanti. Bila prosesnya tertunda, komisi mungkin menginginkan diadakannya dengar pendapat publik untuk mengungkap mengapa ini terjadi. Kalau mereka memiliki kewenangan, komisi dapat mengundang Menteri atau pejabat pemerintah senior yang memimpin EITI untuk bersaksi tentang kemajuan validasi. Dengan menyiarkan dengar pendapatnya dan/atau mengadakan konferensi pers EITI, legislator dapat mendatangkan perhatian terhadap keterlambatan ini, dan dapat mendesak pemerintah untuk memenuhi kewajibannya mengenai EITI.
- *Tawarkan untuk memberikan pengarahan pada validator*
Komisi yang telah mengadakan dengar pendapat tentang laporan atau proses EITI, atau melakukan tinjauan mereka sendiri atas program EITI akan memiliki informasi yang berharga untuk dibagi dengan validator. Validator kemungkinan akan meminta pertemuan dengan komisi yang relevan, namun bila tidak, legislator harus mengambil inisiatif dan menghubungi validator untuk berbagi pandangan mereka.
- *Meminta salinan laporan validasi*
Laporan validasi harus tersedia bagi publik begitu difinalisasi; namun, MSG dan pemerintah harus melihatnya lebih dulu. Bila terdapat ketidaksepakatan, validator harus mencoba menyelesaikannya bekerjasama dengan pemerintah dan MSG. Waktu yang ideal bagi legislator untuk menerima laporan adalah ketika MSG dan pemerintah menerimanya. Ini memungkinkan komisi dengan tanggung jawab pengawasan yang relevan untuk menyadari masalah-masalah yang diidentifikasi, dan mungkin membantu mengatasi ketidaksepakatan pemerintah atau MSG. Legislator harus sadar bahwa pemerintah mungkin saja ragu untuk membagi laporannya sebelum semua ketidaksepakatan diselesaikan.
- *Membandingkan laporan validasi dengan isu-isu yang diidentifikasi melalui pengawasan EITI sebelumnya*
Bila lembaga legislatif selama ini telah aktif memantau proses EITI sebelum validasi, temuan-temuan laporan validasi cenderung memasukkan kesimpulan-kesimpulan yang serupa dengan yang ditarik oleh lembaga legislatif. Pastikan untuk melihat apakah perbedaan-perbedaan atau masalah yang sebelumnya diidentifikasi tercantum di dalamnya. Bila tidak, akan menjadi penting untuk mengungkap apakah dan tepatnya bagaimana masalah-masalah itu telah diselesaikan.
- *Bertemu dengan validator*
Begitu memperoleh salinan dari laporan validasi, komisi dapat meminta pertemuan dengan validator independen. Validator dapat menjelaskan laporan tersebut dan temuan-temuannya, dan mungkin dapat mengklarifikasi mengapa isu-isu yang diharapkan oleh legislator akan ditangani masih belum diselesaikan.

Memperkuat Proses EITI



Bab IX.

Banyak negara telah memilih untuk memperkuat dan mengembangkan lanjut program-program EITI mereka. Bab ini membahas beberapa kontribusi yang dapat diberikan para legislator

Mengapa penting untuk memperkuat proses EITI?

Meluncurkan sebuah program EITI merupakan sebuah capaian penting: suatu program EITI yang efektif akan menyediakan lebih banyak informasi kepada publik tentang apa yang diterima oleh pemerintah mereka dari pendapatan sumberdaya alam, dan bagaimana pendapatan ini dikumpulkan dan dikelola. Untuk memastikan bahwa EITI berkelanjutan, bahwa ini sepenuhnya mencerminkan keadaan spesifik suatu negara, dan bahwa informasinya mulai digunakan sebagai piranti dalam anggaran, para legislator akan mempertimbangkan cara-cara untuk meneruskan lebih lanjut dan mengembangkan program EITI negara mereka. Bab ini membahas beberapa tindakan ini, dan menyoroti bagaimana para legislator dapat memberikan kontribusi untuk memaksimalkan manfaat dari program EITI.

Bagaimana meloloskan undang-undang EITI dapat membantu membuat programnya lebih berhasil?

Menguatkan proses EITI menjadi undang-undang dapat memperkuat program ini dalam beberapa cara. Proses EITI tergantung pada hasrat pemerintah untuk melaksanakannya, dan kepatuhan perusahaan serta entitas pemerintah dalam menyampaikan laporan tidak mengikat secara hukum. Sebuah undang-undang EITI dapat memastikan bahwa program EITI berkelanjutan, bertahan menghadapi perubahan-perubahan dalam pemerintah, dan memberikan sanksi ketika perusahaan dan entitas pemerintah tidak menyampaikan laporan mereka.

Undang-Undang Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif Nigeria (NEITI)

UU NEITI diundangkan pada bulan Mei 2007, membuat Nigeria negara pertama yang memberikan landasan berupa undang-undang pada program EITI-nya. Undang-Undang ini menuntut pelaporan tahunan, membentuk Sekretariat NEITI sebagai entitas hukum tetap, menggariskan aturan-aturan dan prosedur untuk menunjuk anggota MSG, dan mendefinisikan secara hukum peran dari MSG. Undang-Undang ini juga memperkuat NEITI dengan:

- Membuat pelaporan perusahaan dan pemerintah wajib (yang tidak mematuhi dapat dikenai sanksi)
- Mengharuskan laporan audit diperiksa oleh Auditor Jenderal (semacam BPK – pen.)
- Mengharuskan laporan audit disampaikan kepada Majelis Nasional
- Mengharuskan adanya laporan kegiatan NEITI dua kali setahun kepada Majelis Nasional

Memanfaatkan Masukan Pakar dan Publik untuk Meninjau, Memperbaiki, dan Menetapkan RUU NEITI

Untuk meninjau, memperbaiki, dan menetapkan RUU NEITI, Majelis Nasional menggalang dukungan dan kepakaran dari LSM, para pakar EITI, dan organisasi-organisasi internasional. Untuk menganalisis dan memahami RUU NEITI dengan lebih baik, Komisi Senat untuk Pembentukan dan Pelayanan Publik dari Majelis Nasional mengadakan retreat untuk membahas ketentuan-ketentuannya. Anggota-anggota komisi, dengan dukungan dari organisasi internasional, mengundang staf Sekretariat NEITI dan perwakilan Bank Dunia untuk memberikan pengarahan pada mereka tentang bagian-bagian utama dari legislasi tersebut. Pakar-pakar legislatif internasional bekerja dengan mereka untuk menganalisis setiap bagian dari RUU tersebut.

Sumber: *NEITI Act, 2007* (Lihat *Lampiran D*)

Sebuah UU EITI juga memperkuat peran lembaga legislatif dalam EITI. Dalam proses penyusunan, pembahasan, dan peninjauan Undang-Undang tersebut, para legislator dapat membentuk programnya untuk memastikan bahwa itu mencerminkan keadaan negara mereka, secara akurat menyuarakan kebutuhan warga, dan melengkapi undang-undang dan program lain terkait industri ekstraktif. Yang terpenting, sebuah UU akan memperkuat peran pengawasan formal dari lembaga legislatif atas EITI.

Bergerak melampaui inti EITI¹⁵

EITI lebih berharga sebagai piranti transparansi bila laporan EITI mencakup informasi dengan volume dan kualitas yang memadai. Beberapa negara telah mendapat manfaat dari mengembangkan program EITI mereka melampaui persyaratan-persyaratannya. Ghana, Guinea, dan Nigeria, misalnya, telah memilih untuk mengaudit kembali data pemerintah dan perusahaan, sebuah proses yang memastikan bahwa angka-angka yang dimasukkan dalam laporan rekonsiliasi EITI dapat diandalkan dan berkualitas tinggi. Proses EITI juga dapat diterapkan pada transparansi kontrak dan bahkan operasi dari perusahaan-perusahaan ekstraktif. Banyak lagi kerja yang dapat dilakukan pada tingkat nasional untuk menilai dampak dari EITI di masing-masing negara.

15 Untuk gambaranyang terperinci dari isu-isu ini dan contoh-contoh spesifik, lihat *Drilling Down*, hal. 151, Revenue Watch Institute, 2008.

Contoh-Contoh Inovasi EITI

Penggunaan distribusi sub-nasional dari pendapatan: Laporan EITI **Ghana** telah melacak bagian 9% dari pembayaran royalti mineral keseluruhan yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan kemudian didistribusikan kembali kepada pemerintah daerah di wilayah tempat pertambangan terjadi. Audit juga memasukkan sebuah tinjauan tentang belanja dari pihak berwenang di daerah-daerah yang memproduksi.

Memberikan dukungan peraturan atau legislasi bagi EITI: Di **Kazakhstan**, undang-undang tentang penggunaan lapisan tanah bagian bawah (subsoil) diamandemen untuk mengharuskan perusahaan di masa depan melalui kontrak untuk mengolah sumberdaya hidrokarbon atau mineral, untuk berkomitmen pada EITI dengan menjadi penandatanganan dari Nota Kesepahaman Kazakhstan tentang EITI.

Memasukkan audit fisik: Di **Nigeria**, audit keuangan dipadu dengan audit fisik, yang membantu memastikan volume minyak dan gas yang diekstraksi dicatat dan dilaporkan dengan akurat.

Memasukkan perusahaan dan sektor industri non-ekstraktif: MSG **Liberia** memutuskan untuk memasukkan pendapatan dari kehutanan dalam proses rekonsiliasi mereka.

Memasukkan pembayaran terkait non-produksi: Di **Guinea**, pajak penghasilan pribadi dimasukkan dalam proses rekonsiliasi untuk memverifikasi berapa banyak uang yang diperoleh pemerintah dan sistem pensiun industri ekstraktif.

Menghubungkan EITI dengan perumusan anggaran dan pengawasan

Untuk memastikan bahwa EITI mengarah pada penggunaan yang lebih efektif dan efisien atas pendapatan dari industri ekstraktif, ini harus dihubungkan dengan proses anggaran. Sebagai bagian dari peran mereka dalam perumusan dan pengawasan implementasi anggaran nasional, para legislator dapat membantu dalam upaya ini dengan beberapa cara, termasuk:

- *Menggunakan data dari laporan EITI untuk menganalisis anggaran*
Selama peninjauan anggaran, panitia anggaran dan komisi-komisi sektoral yang bertanggung jawab atas EITI harus membandingkan data penerimaan dari laporan EITI dengan penerimaan yang dicantumkan dalam Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN), dan meminta pertanggungjawaban pemerintah bila terdapat perbedaan.
- *Mendorong meningkatnya transparansi dalam implementasi anggaran*
Para legislator harus mengangkat kepentingan nasional dalam proses EITI untuk mendorong pemerintah untuk menjadi lebih transparan tentang bagaimana pendapatan dialokasikan, bagaimana ini dibelanjakan, dan apakah belanja mencerminkan prioritas kebijakan negara. Bila pendapatan pemerintah tidak dimasukkan sebagai bagian dari RAPBN, pada legislator dapat memperjuangkan pencantumannya.

Menjadi Bagian dari Gerakan EITI Dunia



Bab X.

Legislator dapat mengambil manfaat dari meningkatnya dukungan bagi EITI dan prakarsa transparansi lainnya untuk mengkoordinasi dan memperkuat upaya-upaya mereka. Bab ini menyoroti upaya-upaya internasional dan regional yang dapat meningkatkan efektivitas program-program EITI.

"Sebagai legislator kami mempunyai tanggung jawab untuk menjadi pemimpin dalam isu-isu transparansi industri ekstraktif. Salah satu cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan belajar dari pengalaman rekan-rekan kita di negara lain – kami perlu tahu apa yang sudah berjalan, apa yang tidak, dan apa yang dapat kami lakukan di negara kami sendiri untuk memperkuat apa yang tengah dilakukan yang lain."

— Anggota Kongres Barney Frank
Ketua, Komisi Keuangan Dewan
Kongres Amerika Serikat

Meningkatnya dukungan internasional bagi EITI berarti menunjukkan adanya suatu jaringan besar yang terdiri atas pemerintah, organisasi, dan perorangan yang tertarik dalam dan memiliki pengetahuan tentang proses ini. Para legislator harus memanfaatkan ketertarikan dan keahlian ini untuk memperkuat upaya-upaya yang dilakukan dan berbagi pengalaman.

Mengaitkan upaya-upaya dari negara-negara yang menerapkan EITI

Sejumlah prakarsa yang dapat melengkapi dan memperkuat program EITI di tingkat negara sedang dilakukan atau direncanakan. Beberapa darinya dapat melengkapi persyaratan pelaporan perusahaan yang merupakan bagian dari program EITI tingkat negara. Kongres AS, misalnya,

sedang mempertimbangkan sebuah RUU¹⁶ yang akan mengharuskan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Komisi Keamanan dan Pertukaran AS untuk melaporkan pembayaran-pembayaran yang diberikan kepada pemerintah negara asing untuk ekstraksi minyak, gas, dan mineral.

Pada tingkat regional, legislator dan aktor lain kian mengkoordinasikan upaya-upaya mereka dan berbagi praktek-praktek terbaik. Konferensi EITI Afrika Barat, yang diselenggarakan pada September 2008, mengumpulkan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, perusahaan, dan donor dari negara-negara Afrika Barat dan juga Norwegia, Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya. Para peserta konferensi berbagi gagasan dan strategi untuk menangani tantangan-tantangan dalam implementasi EITI, demikian pula praktek-praktek terbaik dan pelajaran-pelajaran yang dipetik. Mereka juga membicarakan strategi-strategi untuk mempromosikan EITI dalam Masyarakat Ekonomi Afrika Barat (ECOWAS) dan Uni Afrika.

Studi Kasus 13

Majelis Legislatif Afrika Timur (EALA) dan Kerjasama Kawasan

Para anggota badan legislatif dari Masyarakat Afrika Timur (EAC), EALA, telah mulai mempromosikan transparansi penerimaan dari sumberdaya pada tingkat regional dan di negara-negara anggota mereka yakni Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, dan Uganda. Pada awal 2008, EALA mengadakan sebuah workshop awal untuk mengumpulkan anggota-anggota EALA dan para legislator dari negara anggota untuk mempelajari industri-industri ekstraktif di kawasan ini dan membahas bidang-bidang yang potensial bagi kerjasama. Badan ini mengeluarkan resolusi berisi 21 butir, yang di dalamnya direkomendasikan bahwa semua negara anggota EAC bergabung dengan EITI.

EALA juga membentuk sebuah panitia ad hoc untuk mengorganisir upaya-upayanya dalam industri ekstraktif. Salah satu dari kegiatan resmi pertama dari panitia ini adalah melakukan kunjungan lapangan ke operasi pertambangan di Tanzania. Para anggota berkonsultasi dengan pejabat pemerintah, operator industri, dan organisasi masyarakat sipil setempat.

Berjejaring dalam organisasi legislatif internasional

Para legislator mungkin dapat memperkuat pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam transparansi industri ekstraktif dengan berjejaring dengan rekan-rekan mereka melalui organisasi-organisasi legislatif internasional. Misalnya, *Global Parliamentarians Against Corruption* (GOPAC) adalah sebuah jaringan legislator yang berdedikasi untuk melawan korupsi. Melalui sekretariat internasional dan 13 cabangnya di tingkat kawasan, GOPAC menyediakan informasi dan dukungan kepada anggota-anggotanya. *Commonwealth Parliamentary Association* (CPA), yang anggotanya terdiri dari semua parlemen negara Persemakmuran, serta *Inter-Parliamentary Union* (IPU) juga dapat menjadi ajang yang berguna bagi pertukaran informasi dan pembelajaran. *Parliamentary Network on the World Bank* (PNOWB), sebuah organisasi keanggotaan parlemen internasional yang diabdikan untuk mendorong transparansi dalam pembangunan, mengadakan konferensi-konferensi dan acara-acara lainnya di mana di dalamnya isu-isu yang penting bagi legislator dibahas.

16 Pada 2008, Undang-Undang Pelaporan Transparansi Industri Ekstraktif (EITD) dikeluarkan oleh Senat (S 3389), dan di Dewan Perwakilan AS (HR 6066). Informasi tambahan dapat diperoleh di www.openthebooks.org

Studi Kasus 14

Parlemen Eropa dan Standar Akuntansi

Sebuah koalisi LSM internasional, termasuk RWI, saat ini menekan Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB) untuk memasukkan sebuah persyaratan agar perusahaan melaporkan pembayaran, biaya, produksi, keuntungan, dan lokasi cabang-cabang mereka berdasarkan negara secara spesifik. IASB telah sepakat untuk mempertimbangkan ini dalam meninjau standar-standar industri ekstraktif. Bila disetujui, standar ini akan mengharuskan sebuah perusahaan multinasional yang terdapat di sebuah negara yang diatur oleh IASB untuk melaporkan data di setiap negara tempatnya beroperasi. Standar ini akan dapat diterapkan hampir secara global karena standar IASB digunakan secara luas (Uni Eropa, kebanyakan negara Afrika, dan Australia).

Parlemen Eropa telah mengeluarkan sebuah resolusi yang meminta Komisi Eropa untuk mendukung “penyusunan sebuah standar akuntansi yang sesuai yang mengharuskan pelaporan per negara oleh perusahaan-perusahaan ekstraktif”

Sumber: Resolusi Komisi Urusan Ekonomi dan Moneter B6-0437/2007 yang dikeluarkan pada 14 November 2007.
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?Type=MOTION&Reference=B6-2007-0437&language=FR>

Studi Kasus 15

Proyek Transparansi Penerimaan dari Arab *Parliamentarians Against Corruption*

Arab Region *Parliamentarians Against Corruption* (ARPAC), sebuah cabang dari *Global Parliamentarians Against Corruption* (GOPAC), tengah melakukan sebuah proyek yang ditujukan untuk memajukan pengawasan legislatif atas penerimaan Pemerintah dengan fokus pada penerimaan dari sumberdaya. Temuan-temuan dari riset awal dan tahap pemetaan akan digunakan untuk mengembangkan ‘alat bantu’ dan membangun kapasitas parlemen untuk mencapai tujuan ini. Proyek ini juga mencakup forum-forum penjangkauan publik dan keterlibatan dengan masyarakat sipil.

Proyek tersebut saat ini sedang diujicobakan di 5 negara: Jordan, Kuwait, Lebanon, Maroko, dan Yaman. Meskipun masing-masing negara memiliki tim riset sendiri yang berdedikasi, manajemen ARPAC menambahkan sinergi pada proyek ini yang tidak bisa dicapai sendiri-sendiri oleh setiap negara.

Memanfaatkan ketertarikan pada EITI untuk mencari dukungan tambahan bagi penguatan legislatif

Para legislator harus menggunakan ketertarikan internasional yang semakin meningkat pada EITI untuk mencari dukungan tambahan bagi penguatan legislatif dalam isu-isu industri ekstraktif. Sejumlah aktor internasional dapat membantu, termasuk Sekretariat EITI Internasional, dan donor bilateral internasional seperti GTZ Jerman, *Oil for Development* dari Norwegia, dan *Department for International Development* dari Inggris. Bank Dunia biasanya menjadi ujung tombak bantuan bagi negara-negara yang tertarik pada EITI melalui kantor-kantornya di tiap negara. Organisasi-organisasi yang dapat menyediakan bantuan teknis bagi keterlibatan dalam EITI termasuk *Revenue Watch Institute* (RWI), *National Democratic Institute* (NDI), dan *World Bank Institute*.

Lampiran A: Prinsip-Prinsip dan Kriteria EITI

Prinsip-Prinsip EITI

1. Kita sama-sama berkeyakinan bahwa penggunaan secara hati-hati kekayaan sumberdaya alam seharusnya menjadi mesin yang penting bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang akan menyumbang bagi pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan, namun bila tidak dikelola dengan baik, dapat menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang negatif.
2. Kita menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan sumberdaya alam bagi keuntungan warga suatu negara adalah dalam wewenang pemerintah yang berdaulat untuk dilakukan sesuai kepentingan pembangunan nasional mereka.
3. Kita mengakui bahwa manfaat dari ekstraksi sumberdaya terjadi dalam aliran-aliran penerimaan setelah bertahun-tahun dan dapat sangat tergantung pada harga.
4. Kita mengakui bahwa suatu pemahaman publik akan penerimaan dan belanja pemerintah selama beberapa waktu akan membantu perdebatan publik dan memberikan informasi bagi pilihan atas opsi-opsi yang sesuai dan realistis bagi pembangunan berkelanjutan.
5. Kita menggarisbawahi pentingnya transparansi oleh pemerintah dan perusahaan dalam industri ekstraktif dan perlunya untuk meningkatkan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan publik.
6. Kita mengakui bahwa pencapaian transparansi yang lebih besar harus diletakkan dalam konteks menghormati kontrak dan undang-undang.
7. Kita menyadari bahwa transparansi keuangan dapat meningkatkan dukungan lingkungan bagi investasi langsung domestik dan asing.
8. Kita percaya pada prinsip dan praktek akuntabilitas oleh pemerintah kepada semua warga negara dalam mengelola aliran-aliran penerimaan dan belanja publik.
9. Kita berkomitmen untuk mendorong standar-standar tinggi dalam transparansi dan akuntabilitas dalam kehidupan publik, operasi pemerintah, dan dalam dunia usaha.
10. Kita percaya bahwa suatu pendekatan yang secara luas konsisten dan dapat dijalankan untuk pelaporan pembayaran dan penerimaan diperlukan, yang sederhana untuk dilakukan dan digunakan.
11. Kita percaya bahwa pelaporan pembayaran di suatu negara harus melibatkan semua perusahaan industri ekstraktif yang beroperasi di negara tersebut.
12. Dalam mencari solusi, kita percaya bahwa semua pemangku kepentingan memiliki kontribusi yang penting dan relevan untuk diberikan – termasuk pemerintah dan lembaga-lembaganya, perusahaan-perusahaan industri ekstraktif, perusahaan jasa, organisasi multilateral, organisasi keuangan, investor, dan organisasi non-pemerintah.

Kriteria EITI

1. Publikasi teratur tentang semua pembayaran minyak, gas, dan pertambangan material oleh perusahaan kepada pemerintah ("pembayaran") dan semua penerimaan material yang diterima oleh pemerintah dari perusahaan minyak, gas, dan pertambangan ("penerimaan") kepada audiens yang luas dengan cara yang dapat diakses publik, menyeluruh, dan dapat dipahami.
2. Di mana audit belum ada, pembayaran dan penerimaan harus dikenakan audit yang kredibel dan independen yang menerapkan standar audit internasional.
3. Pembayaran dan penerimaan direkonsiliasikan oleh administrator yang kredibel dan independen yang menerapkan standar audit internasional dan dengan publikasi pendapat administrator terkait rekonsiliasi tersebut, termasuk perbedaan-perbedaan, bila ditemukan ada.
4. Pendekatan ini diperluas kepada semua perusahaan termasuk perusahaan milik negara.
5. Masyarakat sipil terlibat aktif sebagai peserta dalam desain, monitoring, dan evaluasi proses ini dan berkontribusi pada debat publik.
6. Sebuah rencana kerja yang dibuka untuk umum dan berkelanjutan secara keuangan untuk kesemua hal di atas disusun oleh pemerintah tuan rumah, dengan bantuan dari lembaga-lembaga keuangan internasional bila perlu, termasuk sasaran-sasaran yang bisa diukur, kerangka waktu bagi implementasi, dan sebuah tinjauan tentang kendala-kendala kapasitas berpotensi terjadi.

Lampiran B: Ringkasan Strategi-Strategi Legislatif tentang EITI

Tahapan dari proses EITI	Pertanyaan yang harus diajukan legislator	Hal-hal yang harus dilakukan legislator
MENANDATANGANI		BERSIAP UNTUK EITI
<ul style="list-style-type: none"> ■ Mengeluarkan pengumuman pemerintah ■ Berkomitmen untuk bekerja dengan semua pemangku kepentingan ■ Menunjuk penanggung jawab implementasi ■ Menyusun, menyetujui, dan mempublikasikan rencana kerja 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Apa itu EITI? Bagaimana bekerjanya? Apakah ini relevan untuk negara saya? ■ Apa industri ekstraktif kunci/penting di negara saya? Perusahaan-perusahaan utama yang mana yang mengeksplorasi dan memproduksi? Seberapa banyak kontribusi mereka pada PDB negara saya? Pada pendapatan fiskal? Pada ekspor? ■ Entitas pemerintah yang mana yang mengelola penerimaan dan industri ekstraktif? Badan pemerintah yang mana yang mengatur industri tersebut? Apakah ada BUMN atau apakah negara memiliki saham dalam proyek-proyek ekstraktif? ■ Kontrak-kontrak apa yang telah ditandatangani oleh pemerintah? Apakah lembaga legislatif meninjaunya? Apakah kontrak tersebut terbuka untuk umum? Apa ketentuan-ketentuan kunci di dalamnya? ■ Seberapa transparan pembayaran perusahaan dan penerimaan pemerintah? ■ Sudahkah pemerintah mengumumkan niatnya untuk menerapkan EITI? Bila tidak, mengapa? 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Melakukan kunjungan-kunjungan ke operasi industri ekstraktif di lapangan ■ Mengadakan brifing dengan pejabat departemen minyak dan pertambangan, LSM, dan Bank Dunia atau staf donor internasional lainnya ■ Mengadakan dengar pendapat informatif dan mengundang pejabat departemen minyak dan pertambangan, LSM, dan pakar lainnya ■ Membiayai sebuah kajian untuk memeriksa bagaimana industri tersebut bekerja ■ Mengeluarkan laporan komisi dengan rekomendasi untuk mengadopsi EITI ■ Berpartisipasi dalam lokakarya lintas pemangku kepentingan tentang bagaimana EITI bekerja ■ Bekerja melalui media untuk membangun kesadaran publik ■ Mendorong resolusi lembaga legislatif untuk mengadopsi EITI
PERSIAPAN		MEMBANGUN STRUKTUR TATAKELOLA EITI
<ul style="list-style-type: none"> ■ Membentuk MSG ■ Melibatkan masyarakat sipil ■ Melibatkan perusahaan-perusahaan ■ Menghilangkan kendala-kendala bagi implementasi ■ Menyetujui kerangka pelaporan ■ Menyetujui administrator EITI ■ Memastikan partisipasi penuh dari perusahaan ■ Memastikan laporan-laporan keuangan perusahaan diaudit dengan semestinya ■ Memastikan bahwa laporan-laporan keuangan pemerintah diaudit dengan semestinya 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bagaimana EITI dikelola? Apakah ada peraturan EITI resmi? Apakah bisa ditinjau? ■ Siapa pejabat pemerintah yang mengkoordinir EITI? Apakah yang bersangkutan memiliki keahlian yang tepat untuk mengelola prosesnya? Badan pemerintah atau departemen yang mana yang mengelola EITI? Apakah ada konflik kepentingan antara peran badan pemerintah dengan implementasi EITI? ■ Sudahkah sekretariat nasional dibentuk? Apakah sekretariat ini memiliki sumberdaya keuangan yang memadai juga sumberdaya manusia yang terampil? ■ Apakah MSG sudah dibentuk? ■ Badan pemerintah yang mana yang terwakili dalam MSG? Apakah keterwakilan mereka terjustifikasi dengan kemampuan mereka untuk mendukung prosesnya? ■ Apakah masyarakat sipil terwakili dalam MSG? Apakah diperbolehkan untuk memilih sendiri anggota-anggotanya? Apakah kelompok yang terseleksi independen dari pemerintah? Apakah mereka berpartisipasi dalam pertemuan? ■ Apakah sektor swasta terwakili dengan memadai dalam MSG? Apakah industri-industri utama berpartisipasi dalam rapat-rapat komite? ■ Apakah lembaga legislatif terwakili? Haruskah lembaga legislatif terwakili dalam MSG? ■ Apakah dokumen-dokumen terkait EITI (peraturan, kerangka, rencana kerja dan agenda MSG serta notulensi rapat) dapat dilihat oleh lembaga legislatif? Apakah dokumen tersebut dapat diakses dengan mudah oleh publik? 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Melakukan kunjungan-kunjungan ke operasi industri ekstraktif di lapangan ■ Mengadakan brifing dengan pejabat departemen minyak dan pertambangan, LSM, dan Bank Dunia atau staf donor internasional lainnya ■ Mengadakan dengar pendapat informatif dan mengundang pejabat departemen minyak dan pertambangan, LSM, dan pakar lainnya ■ Membiayai sebuah kajian untuk memeriksa bagaimana industri tersebut bekerja ■ Mengeluarkan laporan komisi dengan rekomendasi untuk mengadopsi EITI ■ Berpartisipasi dalam workshop lintas pemangku kepentingan tentang bagaimana EITI bekerja ■ Bekerja melalui media untuk membangun kesadaran publik ■ Mendorong resolusi lembaga legislatif untuk mengadopsi EITI

Tahapan dari proses EITI	Pertanyaan yang harus diajukan legislator	Hal-hal yang harus dilakukan legislator
PERSIAPAN (lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Berapa seharusnya level materialitas dari pembayaran? ■ Apakah rekonsiliasi akan menghasilkan data yang telah didisagregasikan berdasarkan perusahaan dan pembayaran? Bila tidak, mengapa? ■ Apakah data yang digunakan kredibel? Apakah mereka mensyaratkan audit? ■ Apakah sumberdaya yang memadai telah dialokasikan untuk EITI? Seberapa besar anggaran EITI? Apakah ini dibiayai donor, anggaran, atau campuran keduanya? ■ Apakah MSG mematuhi rencana kerja dan kerangka waktu yang telah disepakati? Bila tidak, mengapa? ■ Apakah semua pemangku kepentingan puas dengan cara prosesnya diimplementasikan? ■ Apakah administrator telah dipilih? Apakah secara teknis administrator memiliki kualifikasi untuk menjalankan proses rekonsiliasinya? Apakah prosedur pengadaan dipatuhi dalam proses pemilihannya? ■ Apakah kesenjangan kapasitas telah ditinjau? Apakah tengah dibuat strategi penguatan kapasitas? Apakah ini didanai? ■ Apakah sebuah strategi komunikasi telah disetujui? Apakah sebuah situs web telah dibuat? 	MEMBANTU MEMBENTUK PROGRAM EITI <ul style="list-style-type: none"> ■ Mempelajari apa yang akan dimasukkan dalam rencana kerja, kerangka pelaporan, dan kerangka acuan administrator ■ Bekerja dengan para pemangku kepentingan dari masyarakat sipil, perusahaan, dan pemerintah untuk membantu mengatasi penundaan-penundaan dan hambatan-hambatan dalam implementasi ■ Meminta pengiriman otomatis dokumen-dokumen publik EITI ■ Meminta laporan progres dari administrator untuk disajikan ke depan lembaga legislatif ■ Meminta brifing EITI yang dijadualkan teratur ■ Memastikan EITI mengikuti rencana kerja yang disepakati
PELAPORAN DAN PENINJAUAN <ul style="list-style-type: none"> ■ Melaporkan kepada administrator pembayaran oleh perusahaan kepada pemerintah ■ Melaporkan kepada administrator penerimaan oleh pemerintah ■ Memastikan angka-angka pembayaran dan penerimaan direkonsiliasi ■ Mengidentifikasi perbedaan dan merekomendasikan perbaikan ■ Memeriksa dukungan implementasi perusahaan ■ Meninjau tindakan-tindakan yang diambil atas pelajaran yang dipetik 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Apakah laporannya menyeluruh? Apakah administrator memenuhi kerangka acuannya? Bila tidak, mengapa? ■ Apakah semua perusahaan dan lembaga negara memberikan data? Bila tidak, yang mana yang tidak dan mengapa? Apakah ada tindakan diambil terhadap perusahaan dan lembaga negara yang tidak mau bekerja sama? Bila tidak, mengapa? ■ Apakah semua aliran material dimasukkan? Bila tidak, mengapa? ■ Apakah semua sumberdaya ekstraktif dimasukkan? Bila tidak, mengapa? ■ Apakah ada perbedaan atau kesenjangan yang disorot dalam laporan? Apakah laporannya menjelaskan alasan-alasan di belakang perbedaan tersebut? Bila tidak, mengapa? ■ Apakah laporannya memuat rekomendasi? Apakah pemerintah telah menyusun suatu strategi reformasi untuk mengatasinya? Apakah strateginya dapat dilihat oleh lembaga legislatif dan publik? Apakah strateginya memadai? ■ Apakah fase pelaporan baru dijadualkan? Bila tidak, mengapa? 	MENGANALISIS DAN MEMPERBAIKI LAPORAN DAN PROSES EITI <ul style="list-style-type: none"> ■ Bertemu dengan administrator dan dengan LSM untuk mendiskusikan temuan-temuan laporan ■ Mengadakan dengar pendapat publik untuk membahas temuan-temuan laporan ■ Menyusun panitia khusus (investigatif) untuk memeriksa perbedaan atau masalah-masalah yang besar ■ Mengeluarkan laporan komisi yang menyorot bidang-bidang di mana pemerintah harus bertindak ■ Mendorong tindakan pemerintah melalui pertanyaan parlemen kepada pemerintah ■ Meminta dilakukannya sebuah audit

Tahapan dari proses EITI	Pertanyaan yang harus diajukan legislator	Hal-hal yang harus dilakukan legislator
DISEMINASI		MENGGOMUNIKASIKAN LAPORAN EITI
<ul style="list-style-type: none"> Menyebarkan laporan EITI 	<ul style="list-style-type: none"> Apakah laporannya komprehensif dan bisa diakses dengan mudah? Apakah laporannya telah dicetak dan disebar dalam bentuk cetak? Kepada siapa? Apakah sudah dimuat dalam situs web? Apakah strategi komunikasi telah diterapkan? Dengan cara bagaimana? Bagaimana legislator dapat membantu mengkomunikasikan hasil-hasil EITI? Bagaimana partai bisa membantu? Bagaimana lembaga legislatif bisa membantu? 	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan laporan EITI dibuka untuk publik Memperjelas tujuan-tujuan komunikasi Mengkoordinasikan upaya-upaya dengan masyarakat sipi Melakukan penjangkauan tentang EITI melalui kegiatan hubungan konstituen Melakukan penjangkauan berbasis komisi tentang EITI
VALIDASI		MEMASTIKAN PROSES VALIDASI YANG BERHASIL
<ul style="list-style-type: none"> Negara menjalani validasi eksternal 	<ul style="list-style-type: none"> Apakah negara saya hanya kandidat EITI? Bila demikian, apakah perlu langkah-langkah untuk divalidasi? Apakah terdapat strategi dan kerangka waktu validasi? Apakah bisa dilihat lembaga legislatif dan masyarakat? Apakah validator telah dipilih? Apakah secara teknis ia berkualifikasi untuk melakukan proses rekonsiliasinya? Apakah prosedur pengadaan diindahkan dalam proses memilihnya? Apakah laporan validator tersedia untuk lembaga legislatif? Apakah bisa dilihat oleh masyarakat? Penilaian apa yang diberikannya? Tindakan-tindakan apa yang direkomendasikan? 	<ul style="list-style-type: none"> Bertemu dengan validator Membandingkan laporan dengan isu-isu yang diidentifikasi dalam pengawasan atas EITI sebelumnya Meminta salinan laporan validasinya Menawarkan untuk membriefing validator Mengadakan dengar pendapat publik tentang temuan-temuan laporan untuk mendorong pemerintah melakukan validasi
MELAMPAUI EITI		MEMPERKUAT PROSES EITI
	<ul style="list-style-type: none"> Apakah EITI menyediakan informasi yang berguna untuk pekerjaan saya terkait anggaran? Bagaimana saya bisa memperkuat proses EITI di negara saya? Dapatkan sebuah undang-undang tentang EITI membantu? Apakah ada lubang-lubang yang ditemukan dalam proses EITI yang bisa diatasi oleh sebuah undang-undang? Dapatkah EITI dikembangkan ke sektor sumberdaya lain yang relevan di negara saya seperti kehutanan dan perikanan? Dapatkah ini dikembangkan untuk melacak dana alokasi sumberdaya ke pemerintah subnasional? Dapatkah ini dikembangkan untuk mencakup peninjauan atas belanja? Dapatkah ini dikembangkan untuk mencakup audit ulang atas pembayaran dan penerimaan atau jenis audit lainnya seperti audit <i>value for money</i>, audit proses, dan audit fisik? 	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan UU tentang EITI untuk melebarkan dan memperkuat prosesnya Mempertimbangkan untuk bergerak melampaui EITI untuk memperdalam atau memperluas program EITI Menghubungkan reformasi antikorupsi dan tatapemerintahan yang baik lainnya dengan EITI Menghubungkan EITI dengan proses perumusan anggaran dan pengawasan
		MENJADI BAGIAN DARI GERAKAN EITI DUNIA
	<ul style="list-style-type: none"> Apakah ada negara tetangga yang menerapkan EITI? Dapatkah dirumuskan strategi-strategi kawasan untuk mendukung transparansi di negara dan kawasan saya? 	<ul style="list-style-type: none"> Hubungkan upaya-upaya terkait EITI dengan legislator di negara lain Berjejaring dalam organisasi legislatif internasional Mendorong kerjasama kawasan tentang EITI Memanfaatkan ketertarikan pada EITI untuk mencari dukungan tambahan bagi penguatan legislatif

Lampiran C: Daftar Sumber Bacaan Tambahan

Sumber Bacaan EITI

■ EITI Factsheet

Extractive Industries Transparency Initiative, Regularly updated

Panduan penting empat halaman yang mudah diikuti tentang apa, bagaimana, mengapa, dan siapa seputar EITI.

www.eiti.org

■ EITI Business Guide

Extractive Industries Transparency Initiative, 2008

Panduan ini mengulas bagaimana perusahaan-perusahaan dapat mendukung dan memainkan peran dalam EITI dan transparansi penerimaan di negara-negara tempat mereka beroperasi.

<http://www.eiti.org/document/businessguide>

■ EITI Validation Guide

Extractive Industries Transparency Initiative, 2006

Panduan ini menjelaskan bagaimana validasi seharusnya berjalan, kapan ini harus dilakukan, dan hasil yang diharapkan dari prosesnya. Ini meliputi Validation Grid, sebuah diagram yang memperlihatkan setiap langkah dalam proses EITI, dan *Indicator Assessment Tools*, yang mendaftar pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan oleh validator untuk memastikan dipatuhinya proses EITI.

<http://www.eiti.org/document/validationguide>

■ Talking Transparency: A Guide for Communicating the EITI

Extractive Industries Transparency Initiative, 2008

Panduan ini membahas strategi-strategi supaya sekretariat nasional EITI dapat berkomunikasi secara efektif kepada publik dan aktor-aktor EITI lainnya mengenai laporan dan proses EITI. Panduan ini mengulas pendekatan-pendekatan untuk merancang strategi komunikasi tentang EITI, dan berbagi studi-studi kasus dari Kamerun, Republik Demokratik Kongo, Kazakhstan, dan Nigeria.

www.eiti.org

■ EITI Sourcebook

Extractive Industries Transparency Initiative, 2005

EITI Sourcebook memberikan panduan tentang bagaimana untuk terlibat dalam EITI, dan ini dimaksudkan untuk membantu negara-negara yang ingin mengimplementasikan EITI dan para pemangku kepentingan yang ingin mendukung implementasi.

<http://www.eiti.org/document/sourcebook>

■ Drilling Down

Revenue Watch Institute, 2008

Drilling Down adalah suatu panduan akunting dan audit dari industri ekstraktif bagi masyarakat sipil. Panduan ini menyajikan sebuah ulasan mengenai konsep-konsep dan isu-isu industri dan keuangan yang penting, seperti tipe kontrak yang berbeda-beda dalam sektor ekstraktif, tipe-tipe laporan pemerintah dan sistem akunting, serta struktur dan arus dana dari dan ke pemerintah, semuanya disajikan untuk audiens masyarakat sipil yang bukan pakar dalam bidang ini.

<http://www.revenuwatch.org/news/publications/drilling-down.php>

■ **Implementing EITI: Early Lessons Learned from the Field**

World Bank, 2008

Publikasi ini mengkompilasi “praktek-praktek terbaik” dan “pelajaran-pelajaran yang dipetik” tentang program-program EITI, dan merupakan sumber informasi tambahan tentang bagaimana proses EITI seharusnya berjalan. Di dalamnya termasuk Lampiran dengan dokumen-dokumen contoh dari beberapa program EITI.

<http://go.worldbank.org/C5OKJZ7860>

■ **EITI Progress Report 2006–2009**

Extractive Industries Transparency Initiative, 2009

Publikasi ini mengulas progres dari prakarsa ini sejak Konferensi Oslo pada 2006 sampai Konferensi Doha 2009. Termasuk di dalamnya potret-potret dari prakarsa dari semua negara yang menerapkannya dan pendapat-pendapat dari seluruh wakil pemangku kepentingan yang mendukungnya.

www.eiti.org

Informasi, bahan, dan berita yang lebih baru tentang prakarsa ini dapat dilihat di www.eitransparency.org, di mana Anda juga dapat berlangganan *newsletter* berkala.

Sumber Bacaan Tambahan

■ **Follow the Money: A Guide to Monitoring Budgets and Oil and Gas Revenues**

Oleh Jim Schulz, Revenue Watch Institute, 2005

http://www.soros.org/initiatives/cep/articles_publications/publications/money_20041117/follow_money.pdf

■ **Committees in Legislatures: A Division of Labor**

National Democratic Institute, 1996

https://www.ndi.org/files/030_ww_committees_0.pdf

■ **Covering Oil: A Reporter’s Guide to Monitoring Budgets and Oil and Gas Revenues**

Diedit oleh Svetlana Tsalik and Anya Schiffrin, Open Society Institute, 2005

<http://www.revenuewatch.org/news/publications/072305.pdf>

■ **Guide on Resource Revenue Transparency**

International Monetary Fund, 2007

www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507g.pdf

■ **Strengthening Legislative Capacity in Legislative-Executive Relations**

National Democratic Institute, 2000

■ **Transparency and Accountability in Africa’s Extractive Industries: The Role of the Legislature**

National Democratic Institute, 2007

http://www.ndi.org/files/2191_extractive_080807.pdf

- **Legislative Ethics: A Comparative Analysis**
National Democratic Institute, 1999
https://www.ndi.org/files/026_ww_legethics_0.pdf
- **Orientation Handbook for Members of Parliaments**
By John Johnson and Robert T. Nakamura, World Bank Institute, 2006
<http://siteresources.worldbank.org/PSGLP/Resources/HandbookforMembersofParlaments.pdf>
- **A Parliamentarian's Guide to the World Bank**
World Bank, 2005
<http://go.worldbank.org/MTLDXXNBX0>
- **Promoting Revenue Transparency: 2008 Report on Revenue Transparency of Oil and Gas Companies**
Transparency International, 2008
http://www.transparency.org/news_room/latest_news/press_releases/2008/2008_04_28_prt_report_launch
- **The Role of Parliament in Curbing Corruption**
Diedit oleh Rich Staphenurst, Niall Johnston, and Ricardo Pelizzo, World Bank Institute, 2006
- **Toward the Development of International Standards for Legislatures: A Discussion Document for Review**
National Democratic Institute, 2007
http://www.ndi.org/files/2113_gov_standards_010107.pdf

Lampiran D: Undang-Undang NEITI (Petikan)

UNDANG-UNDANG PRAKARSA TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF NIGERIA (NEITI), 2007

RANCANGAN UNDANG-UNDANG UNTUK

UNDANG-UNDANG BAGI PEMBENTUKAN PRAKARSA TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF NIGERIA (NEITI) DAN MASALAH-MASALAH TERKAIT

Dikeluarkan oleh Majelis Nasional Republik Federal Nigeria.

1. (1) Dibentuk sebuah badan yang disebut sebagai Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif Nigeria (dalam Undang-Undang ini disebut "NEITI").

(2) NEITI :
 - (a) merupakan badan otonom yang bertanggung jawab kepada Presiden dan Majelis Nasional,
 - (b) akan menjadi badan korporat yang terus-menerus akan melakukan pergantian pengurus dengan segel tetap, dan
 - (c) dapat:
 - (i) menggugat dan digugat dengan nama korporatnya, dan
 - (ii) mendapatkan, memiliki, dan melepas barang bergerak dan tidak bergerak dalam menjalankan fungsi-fungsinya berdasarkan Undang-Undang ini.

2. Tujuan-tujuan utama dari NEITI adalah
 - (a) untuk memastikan proses yang seharusnya dan transparansi dalam pembayaran yang dilakukan oleh semua perusahaan industri ekstraktif kepada Pemerintah Federal dan penerima-penerima sesuai undang-undang;
 - (b) untuk memantau dan memastikan akuntabilitas dalam penerimaan pendapatan Pemerintah Federal dari perusahaan-perusahaan industri ekstraktif;
 - (c) untuk menghapuskan segala bentuk praktek korupsi dalam penentuan, pembayaran, penerimaan, dan penempatan pendapatan yang diperoleh Pemerintah Federal dari perusahaan industri ekstraktif;
 - (d) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam aplikasi sumberdaya dari pembayaran yang diterima dari perusahaan industri ekstraktif, dan
 - (e) untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif.

3. Untuk maksud mewujudkan tujuan-tujuan dari Undang-Undang ini, NEITI harus menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - (a) Menyusun suatu kerangka kerja bagi transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan oleh semua perusahaan industri ekstraktif tentang penerimaan yang seharusnya atau telah dibayarkan kepada Pemerintah Federal.
 - (b) Mengevaluasi tanpa prasangka terhadap kewajiban-kewajiban kontraktual dan kewajiban pemerintah apapun yang relevan, praktek-praktek semua perusahaan industri ekstraktif dan pemerintah tentang akuisisi lahan, penganggaran, pemberian kontrak, pengadaan material, dan profil biaya produksi dalam rangka memastikan proses yang wajar, transparansi, dan akuntabilitas.
 - (c) Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi Pemerintah Federal dalam semua perusahaan industri ekstraktif.
 - (d) Mendapatkan, sebanyak yang dianggap perlu, dari perusahaan industri ekstraktif manapun sebuah catatan yang akurat tentang biaya produksi dan volume penjualan minyak, gas, atau mineral lainnya yang diekstraksi oleh perusahaan pada waktu kapanpun, dengan syarat informasi tersebut tidak boleh digunakan dengan cara apapun yang merugikan kewajiban kontraktual atau kepentingan sebagai pemilik dari perusahaan industri ekstraktif yang bersangkutan.
 - (e) Meminta dari perusahaan apapun dalam industri ekstraktif, atau dari organ manapun yang relevan dari Pemerintah Federal, Negara Bagian, atau Daerah, laporan yang akurat dari uang yang dibayarkan dan diterima dari perusahaan pada kurun waktu manapun, sebagai penerimaan yang diterima oleh Pemerintah Federal dari perusahaan untuk kurun waktu tersebut, dengan syarat informasi tersebut tidak boleh digunakan dengan cara apapun yang merugikan kewajiban kontraktual atau kepentingan sebagai pemilik dari perusahaan industri ekstraktif yang bersangkutan atau kewajiban Pemerintah.

- (f) Memantau dan memastikan bahwa semua pembayaran sebagaimana mestinya kepada Pemerintah Federal dari semua perusahaan industri ekstraktif, termasuk pajak, royalti, dividen, bonus, penalti, pungutan dan sejenisnya, dilakukan sebagaimana mestinya.
 - (g) Mengidentifikasi keterlambatan bayar dan mengambil langkah-langkah yang dapat meningkatkan kapasitas dari organ-organ manapun yang relevan dari Pemerintah Federal, Negara Bagian, atau Daerah yang memiliki tanggung jawab berdasarkan undang-undang untuk memantau pembayaran pendapatan oleh semua perusahaan industri ekstraktif kepada Pemerintah Federal.
 - (h) Menyebarkan dengan cara publikasi dari catatan, laporan, atau informasi lainnya terkait penerimaan yang diperoleh oleh Pemerintah Federal dari semua perusahaan industri ekstraktif, sebagaimana dianggap perlu.
 - (i) Mempromosikan atau melakukan aktivitas apapun lainnya terkait fungsi-fungsinya dan yang, menurut pendapatnya, diperhitungkan membantu mencapai tujuan-tujuan keseluruhan sebagaimana dijabarkan pada Pasal2 Undang-Undang ini;
 - (j) Memastikan bahwa semua alokasi fiskal dan pencairan berdasarkan undang-undang sebagaimana mestinya oleh kepada penerima-penerimaannya berdasarkan undang-undang dilakukan sebagaimana mestinya.
4. (1) Pada masing-masing tahun keuangan NEITI harus menunjuk auditor-auditor independen dengan maksud untuk auditing Penunjukan atas penerimaan total yang diperoleh Pemerintah Federal untuk tahun tersebut dari perusahaan-perusahaan industri ekstraktif, dalam rangka menentukan akurasi pembayaran dan penerimaan.
- (2) Auditor-auditor independen yang ditunjuk berdasarkan ayat (1), dari pasal ini harus melakukan audit fisik, proses, dan keuangan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang disetujui oleh Kelompok Kerja Pemangku Kepentingan Nasional (NSWG).
- (3) Setelah audit selesai, auditor-auditor independen harus memasukkan laporannya bersama-sama dengan komentar dari Perusahaan Industri Ekstraktif kepada NEITI, yang juga harus disebar kepada Majelis Nasional dan Auditor Jendral dari Federasi dan juga memastikan publikasinya.
- (4) NEITI harus memasukkan laporan enam bulanan dari kegiatannya kepada Presiden dan Majelis Nasional.
- (5) Seorang auditor atau suatu firma auditing yang telah mengaudit perusahaan industri ekstraktif apapun pada suatu tahun tidak boleh ditunjuk pada tahun yang sama untuk maksud dari ayat (2) dari pasal ini.
- (6) Seorang auditor atau suatu firm auditing tidak boleh terlibat lebih dari dua tahun berturut-turut untuk maksud dari ayat (2) dari pasal ini.
- (7) Auditor-Jendral dari Federasi dalam waktu tidak lebih dari 3 bulan setelah disampaikannya laporan audit kepada Majelis Nasional harus mempublikasikan komentar atau tindakan apapun yang dibuat atau diambil oleh Pemerintah atas laporan audit.
5. (1) Badan pengelola NEITI adalah Kelompok Kerja Pemangku Kepentingan Nasional (dalam UU ini disebut "NSWG").
- (2) NSWG harus bertanggung jawab untuk perumusan kebijakan, program, dan strategi bagi implementasi yang efektif dari tujuan-tujuan dan pelaksanaan fungsi-fungsi dari NEITI.
- (3) Tanpa mengurangi ayat (2) dari pasal ini, NSWG memiliki kekuasaan untuk merekomendasikan anggaran tahunan dan rencana kerja NEITI dan memastikan peninjauan berkala atas kinerja program NEITI.
6. (1) NSWG dibentuk oleh Presiden dan terdiri dari seorang ketua dan tidak lebih dari 14 orang anggota dengan satu di antaranya menjadi Sekretaris Eksekutif.
- (2) (a) Dalam melakukan penunjukan untuk NSWG, Presiden harus memasukkan:
- (i) perwakilan dari perusahaan-perusahaan industri ekstraktif,
 - (ii) perwakilan dari Masyarakat Sipil,
 - (iii) perwakilan dari Serikat Buruh dalam industri ekstraktif,
 - (iv) pakar-pakar dalam industri ekstraktif, dan
 - (v) satu anggota dari masing-masing dari enam zona geopolitik;
- (b) Ketua dan anggota-anggota NSWG selain Sekretaris Eksekutif bekerja secara paruh waktu.
- (3) Penunjukkan Sekretaris Eksekutif untuk 5 tahun dan tidak dapat ditunjuk lagi.
7. Seseorang yang ditunjuk sebagai anggota NSWG akan menduduki posisinya selama 4 tahun dan tidak dapat ditunjuk lagi.

8. Anggota-anggota NSWG dan orang lain yang ditunjuk untuk komisi-komisi khusus di bawahnya berdasarkan pasal 2 dibayar tunjangan dari dana NEITI sebagaimana disetujui oleh Komisi Mobilisasi Pendapatan dan Fiskal Nasional.
9.
 - (1) NSWG dalam keadaan biasa bertemu setiap tiga bulan dalam melakukan tugasnya pada waktu dan tempat yang dapat ditentukannya, namun tidak kurang dari empat kali dalam satu tahun.
 - (2) Pada setiap pertemuan NSWG, Ketua memimpin dan bila tidak hadir, seorang anggota NSWG yang ditunjuk oleh para anggota di antara mereka sendiri akan memimpin.
 - (3) Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada pertemuan NSWG diputuskan dengan suara mayoritas sederhana dari anggota dan hadir dan voting dan dalam hal suaranya sama banyak, orang yang memimpin rapat memiliki suara penentu.
 - (4) NSWG kapanpun dapat mengangkat siapapun untuk bertindak sebagai penasihat pada pertemuan mereka namun orang yang bersangkutan tidak berhak memberikan suara pada pertemuan apapun.
 - (5) Keabsahan dari hasil pertemuan NSWG tidak dipengaruhi oleh ketidakhadiran anggota manapun, kekosongan keanggotaan, atau cacat apapun dalam penunjukan anggota-anggotanya.
10. Kuorum dari NSWG pada pertemuan apapun adalah 8 anggota.
11. NSWG dapat membentuk komisi-komisi khusus yang dianggapnya sesuai untuk menangani aspek-aspek yang berbeda dari tanggung jawabnya.
12.
 - (1) NSWG dapat menciptakan departemen-departemen dan melibatkan jasa-jasa dari staf pada konsultasi-konsultasi yang dianggapnya perlu bagi NEITI.
 - (2) NEITI memiliki seorang Sekretaris Eksekutif yang
 - (a) ditunjuk oleh Presiden dengan rekomendasi NSWG dengan syarat yang bersangkutan adalah seorang sarjana dengan kualifikasi yang relevan dan sekurang-kurangnya 10 tahun pengalaman yang sama.
 - (b) bertanggung jawab atas administrasi harian NEITI, dan
 - (c) bertindak sebagai Sekretaris bagi NSWG.
 - (3) Staf dan konsultan NEITI dapat dilibatkan dengan ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh NSWG.
 - (4) NSWG menetapkan remunerasi, tunjangan, dan manfaat yang diterima staf dan konsultan NEITI.
 - (5)
 - (a) NSWG merekomendasikan kepada President untuk menunjukan validator sesuai dengan panduan NEITI seperti termuat dalam jadual kedua dari Undang-Undang ini dan
 - (b) NSWG menetapkan remunerasi, tunjangan, dan manfaat yang diterima oleh validator.
13.
 - (1) Dana NEITI terdiri dari:
 - (a) jumlah yang disediakan oleh Pemerintah Federal dan dialokasikan oleh Majelis Nasional berdasarkan anggaran yang diajukan oleh NSWG dan akan dikeluarkan sebagaimana mestinya dan pada waktunya; dan
 - (b) jumlah yang dapat dibayarkan kepada NEITI dalam bentuk hibah, donasi, dan hadiah dengan syarat sumber-sumber dari hibah, donasi, dan hadiah tersebut dilaporkan sebagaimana mestinya dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini.
 - (2) NEITI akan menerapkan pendapatan dari dana yang diperoleh berdasarkan pasal 13(1) dari Undang-Undang ini untuk:
 - (a) biaya administrasi,
 - (b) pembayaran gaji, tunjangan, dan manfaat bagi anggota NSWG dan komisi-komisinya,
 - (c) pembayaran gaji, remunerasi, tunjangan, manfaat pensiun bagi petugas dan pegawai NEITI,
 - (d) pembayaran semua pembelian,
 - (e) pembayaran semua kontrak, termasuk mobilisasi, fluktuasi, variasi, biaya legal, dan biaya administrasi kontrak; dan
 - (f) melakukan aktivitas lainnya yang akan mempromosikan tujuan-tujuannya yang terkait dengan semua atau sebagian fungsi-fungsi NEITI menurut Undang-Undang ini, dan
 - (g) pembayaran kepada validator.
 - (3) Badan pengelola NEITI, NSWG, selambat-lambatnya tanggal 30 September setiap tahun, menyampaikan kepada Presiden dan Majelis Nasional sebuah prakiraan belanja dan pendapatan NEITI pada tahun berikutnya dan NEITI harus membuat laporan keuangan sebagaimana mestinya setiap tahun dan melakukan pencatatan sebagaimana mestinya.

14.
 - (1) NEITI harus menyebabkan laporan dari penerimaan total yang diperoleh Pemerintah Federal dari semua perusahaan industri ekstraktif, pembayaran, aktiva, dan pasivanya untuk diaudit selambat-lambatnya 6 bulan sesudah akhir tahun oleh auditor independen yang ditunjuk dengan ketentuan dan syarat yang disetujui oleh NSWG dan berdasarkan audit tersebut auditor independen yang bersangkutan menyampaikan laporan dengan komentar-komentar dari entitas yang diaudit kepada NEITI yang akan membuat ini dipublikasikan untuk informasi kepada publik, dengan syarat isi dari laporan tersebut tidak akan dipublikasikan dengan cara yang merugikan kewajiban kontraktual atau kepentingan sebagai pemilik dari entitas yang diaudit.
 - (2) NEITI memiliki kekuasaan untuk meminjam uang dari bank dengan persetujuan dari NSWG.
 - (3) NEITI akan menyiapkan dan memasukkan kepada Presiden dan Majelis Nasional selambat-lambatnya pada 30 September setiap tahun, sebuah laporan dari kegiatan-kegiatannya selama tahun sebelumnya, dan memasukkan dalam laporan ini laporan NEITI yang telah diaudit untuk tahun tersebut beserta laporan auditornya.

15.
 - (1) NEITI memiliki rekening-rekening bank, dengan penanda tangan yang ditetapkan oleh NSWG sesuai dengan peraturan yang dibuatnya.
 - (2) Rekening-rekening ini dibuka di bank-bank yang ditetapkan oleh NSWG.

16.
 - (1) Sebuah perusahaan industri ekstraktif yang:
 - (a) memberikan informasi atau laporan palsu kepada Pemerintah Federal atau lembaganya tentang volume atau produksi, penjualan, dan pendapatannya, atau
 - (b) menyampaikan laporan keuangan palsu atau tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana diminta berdasarkan Undang-Undang ini kepada Pemerintah Federal atau lembaganya, yang mengakibatkan kurangnya pembayaran atau tidak dibayarkannya penerimaan yang seharusnya diperoleh Pemerintah Federal, atau penerima-penerima berdasarkan undang-undang melakukan pelanggaran dan dapat dikenai denda tidak kurang dari N30,000,000.
 - (2) Bila industri ekstraktif tersebut telah diputuskan melakukan pelanggaran berdasarkan ayat (1) dari pasal ini, pengadilan akan, selain hukuman yang dituliskan di sini, memerintahkan perusahaan yang bersangkutan membayarkan jumlah penerimaan yang seharusnya dibayarkan kepada Pemerintah Federal.
 - (3) Sebuah perusahaan industri ekstraktif yang menunda atau menolak untuk memberikan informasi atau melapor berdasarkan Undang-Undang ini, atau dengan sengaja atau tidak sengaja tidak melakukan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang ini, melakukan pelanggaran dan dapat dikenai denda sekurang-kurangnya N30,000,000.
 - (4) Tanpa mengurangi ayat (1), (2), dan (3) dari pasal ini, Presiden dengan rekomendasi NSWG dapat menskors atau mencabut izin operasi dari perusahaan industri ekstraktif apapun yang tidak menjalankan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang ini.
 - (5) Bila suatu perusahaan industri ekstraktif melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini, setiap Direktur atau orang-orang lain yang terkait dalam manajemen perusahaan tersebut melakukan pelanggaran dan dapat terkena hukuman sekurang-kurangnya 2 tahun penjara atau denda sekurang-kurangnya N5,000,000 kecuali orang yang bersangkutan membuktikan bahwa:
 - (a) kantornya melakukan pelanggaran tanpa persetujuan atau secara diam-diam, dan
 - (b) orang tersebut telah melakukan segala hal untuk mencegah dilakukan pelanggaran tersebut sebagaimana seharusnya dilakukan oleh orang yang bersangkutan, dengan melihat fungsinya dalam perusahaan tersebut dan keadaannya.
 - (6) Seorang pejabat pemerintah yang memberikan laporan keuangan palsu atau tidak memberikan laporan keuangan yang diminta berdasarkan Undang-Undang ini kepada Pemerintah Federal atau lembaganya, yang mengakibatkan kurangnya pembayaran atau tidak dibayarkannya penerimaan yang seharusnya diperoleh oleh Pemerintah Federal atau penerima-penerimaannya berdasarkan undang-undang, melakukan pelanggaran dan dapat dikenai hukuman sekurang-kurangnya 2 tahun penjara dan denda sekurang-kurangnya N5,000,000 kecuali orang yang bersangkutan membuktikan bahwa:
 - (a) pelanggaran tersebut dilakukan tanpa persetujuannya atau dengan diam-diam, dan
 - (b) orang tersebut telah melakukan segala hal untuk mencegah dilakukan pelanggaran tersebut sebagaimana seharusnya dilakukan oleh orang yang bersangkutan, dengan melihat fungsinya dalam lembaga tersebut dan keadaannya.

17. NSWG dapat membuat peraturan yang dianggap bijaksana dengan maksud untuk menjalankan ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang ini dan mengatur masalah apapun yang berada dalam cakupan fungsi-fungsi NEITI.

18. Menurut ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang ini, tidak ada gugatan yang diajukan terhadap NEITI sebelum berakhirnya 30 hari setelah pemberitahuan tertulis dari suatu niat untuk mengajukan gugatan terhadap EITI sebagai tergugat atau agennya, dan pemberitahuan tersebut harus menyatakan dengan jelas dan eksplisit:
- (a) sebab dari tindakan tersebut;
 - (b) fakta-fakta dari klaimnya;
 - (c) nama-nama dan penasihat hukum yang mewakili tergugat serta alamat mereka; dan
 - (d) penyelesaian yang diminta.
19. (1) Sekretaris Eksekutif dari NEITI, petugas, pegawai, dan agennya secara pribadi dapat dikenakan tindakan, klaim, atau tuntutan oleh siapapun terkait apapun yang mereka kerjakan atau lalai untuk dikerjakan dalam menjalankan fungsi atau kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang ini kepada NEITI atau anggota NSWG.
- (2) Seorang anggota NSWG, Sekretaris Eksekutif atau petugas dari NEITI akan mendapatkan ganti dari dana NEITI untuk kewajiban yang jatuh pada yang bersangkutan dalam membela diri dalam persidangan, baik perdata maupun pidana, bila persidangan dilakukan terhadapnya dalam kapasitasnya sebagai anggota NSWG, Sekretaris Eksekutif, petugas, atau pegawai NEITI.
- (3) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini, ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Perlindungan Petugas Publik berlaku dalam hubungannya adanya gugatan apapun diajukan terhadap petugas, atau pegawai NEITI, atau anggota NSWG.
20. Sebuah pemberitahuan, panggilan, proses pengadilan lainnya, dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh atau diharuskan untuk diberikan kepada NEITI berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini, undang-undang atau ketetapan lainnya, disampaikan dengan menyampaikannya kepada Sekretaris Eksekutif atau dengan mengirimkannya dengan pos tercatat dan dialamatkan kepada Sekretaris Eksekutif di kantor pusat NEITI.
21. **Dalam Undang-Undang ini:**
- “Perusahaan Industri ekstraktif” berarti perusahaan apapun di Nigeria yang terlibat dalam bisnis memprospek, menambang, mengekstraksi, memproses, dan mendistribusikan mineral dan gas, termasuk minyak, emas, batubara, timah, bitumen, berlian, batu mulia, dan sejenisnya, dan termasuk badan apapun yang bertanggung jawab atas pembayaran dari pendapatan industri ekstraktif kepada Pemerintah Federal atau Penerimaannya berdasarkan Undang-Undang;
- “Pemerintah Federal” berarti Pemerintah Federal Nigeria;
- “Pemerintah” berarti tiga jenjang pemerintah Nigeria, termasuk Pemerintah Federal, Negara Bagian, dan Daerah, beserta Departemen dan dinas-dinasnya.
- “Presiden” berarti Presiden sekaligus Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Federal Nigeria;
- “Penerima berdasarkan Undang-Undang” berarti entitas apapun yang kepadanya berdasarkan undang-undang, perusahaan industri ekstraktif atau Pemerintah wajib melakukan pembayaran;
- “Pakar Industri ekstraktif” berarti seseorang yang telah selama minimum sepuluh (10) tahun berada dalam posisi manajemen di industri ekstraktif;
- “NSWG” berarti Kelompok Kerja Pemangku Kepentingan Nasional.
22. Undang-Undang ini dapat disebut sebagai Undang-Undang Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif Nigeria 2007.

KETENTUAN-KETENTUAN TAMBAHAN TERKAIT PRAKARSA TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF NIGERIA, DLL.**Tata Kerja Badan Pengelola**

- 1
 - (1) Berdasarkan pasal 27 dari *Interpretation Act, Cap. 192LFN, 1990* NSWG dapat membuat tata tertib untuk mengatur cara kerja dari Komisi-Komisinya.
 - (2) Kuorum dari NSWG adalah Ketua atau satu orang lainnya yang memimpin rapat ketika Ketua tidak hadir dan 4 anggota lain dari badan pengelola dan kuorum dari Komisi ditentukan oleh badan pengelola.

- 2
 - (1) NSWG mengadakan pertemuan ketika diminta oleh Ketua dan bila Ketua diminta mengadakan pertemuan dengan pemberitahuan yang diberikan kepadanya oleh tidak kurang dari 4 anggota lain, dia harus meminta pertemuan NSWG diadakan dalam 14 hari sejak tanggal pemberitahuan diberikan.
 - (2) Pada pertemuan NSWG apapun, Ketua harus memimpin namun bila dia tidak hadir, anggota yang hadir dalam pertemuan harus menunjuk satu dari mereka untuk memimpin rapat.
 - (3) Ketika NSWG ingin mendapatkan saran dari orang lain tentang suatu hal, ia dapat memintanya untuk kurun yang dianggap perlu, namun orang yang bersangkutan merupakan yang menjadi anggota karena ayat ini tidak memiliki hak suara pada pertemuan NSWG dan tidak bisa dihitung dalam perhitungan kuorum.
 - (4) NSWG pada keadaan biasa bertemu pada waktu dan tempat yang ditentukannya, dan tidak kurang dari empat kali dalam satu tahun.
 - (5) Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam pertemuan NSWG diputuskan dengan mayoritas sederhana dari anggota yang hadir dan voting, dan dalam keadaan suara sama banyak, Ketua atau orang lain yang memimpin memiliki suara kedua atau penentu.

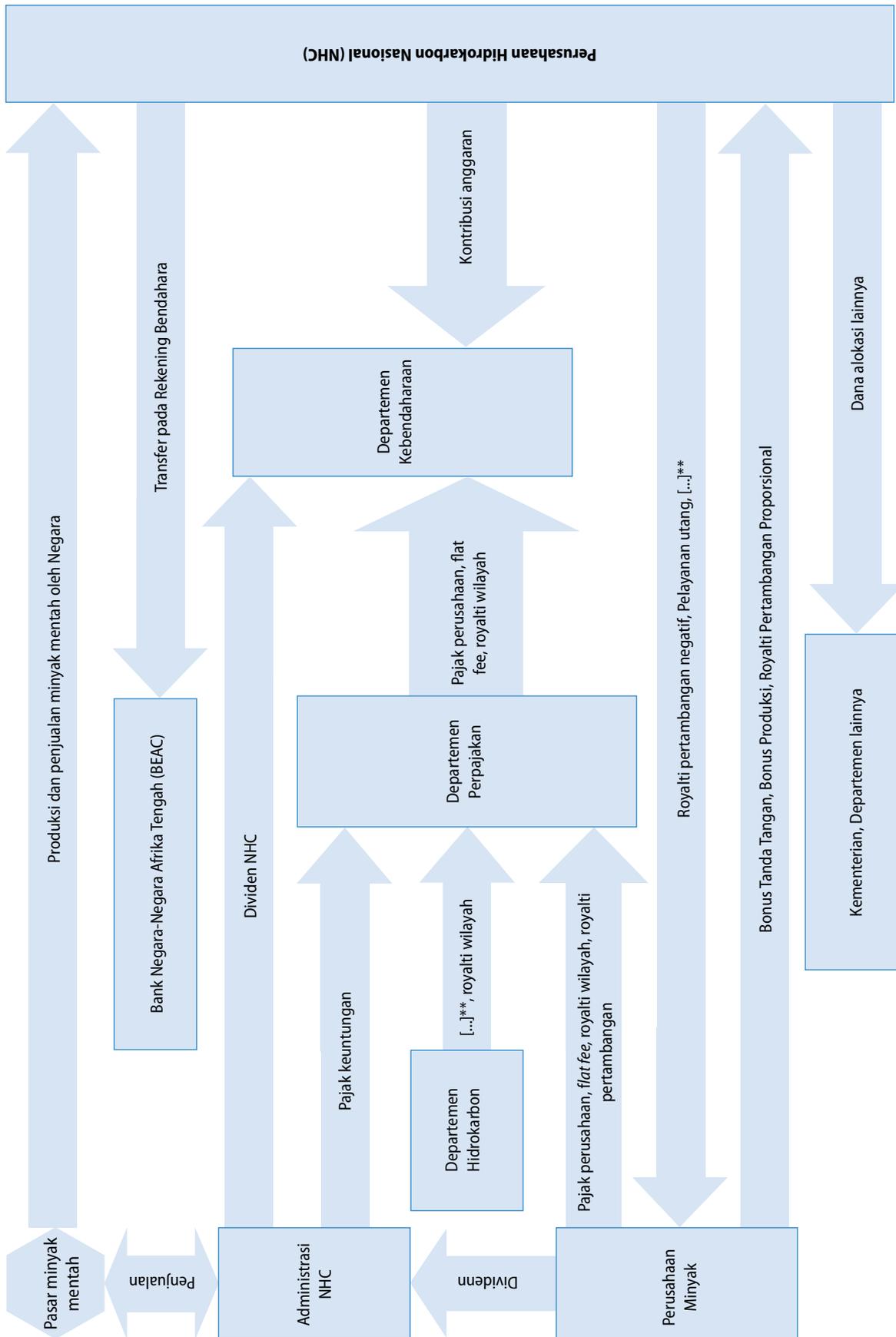
Komisi

- 3
 - (1) NSWG dapat menunjuk satu Komisi atau lebih untuk menjalankan fungsi-fungsi NEITI atas namanya sebagaimana akan ditetapkan.
 - (2) Sebuah Komisi yang ditunjuk berdasarkan pasal ini terdiri dari sejumlah orang yang akan ditentukan oleh NSWG dan satu orang akan bertugas dalam Komisi sesuai dengan ketentuan-ketentuan penunjukannya.
 - (3) Keputusan dari suatu Komisi belum berlaku sebelum diperkuat oleh NSWG.

Lain-Lain

- 4
 - (1) Pemberian segel NEITI dibuktikan keasliannya dengan tanda tangan dari Ketua dan Sekretaris NSWG pada umumnya.
 - (2) Kontrak atau instrumen yang, bila dibuat atau dilakukan oleh seseorang yang bukan merupakan badan korporat tidak harus menggunakan segel, dapat dibuat atau dilakukan atas nama NEITI oleh Sekretaris atau NSWG atau orang lain yang diberi wewenang khusus oleh NSWG untuk bertindak untuk maksud tersebut.
 - (3) Sebuah dokumen yang menyatakan telah dilakukan dengan segel NEITI diterima sebagai bukti dan, kecuali terbukti sebaliknya, dianggap telah dilakukan sebagaimana mestinya.
 - (4) Keabsahan dari hasil pertemuan NSWG atau sebuah Komisi tidak dapat dipengaruhi oleh:
 - a) Kekosongan keanggotaan dalam NSWG atau suatu Komisi, atau
 - b) Cacat dalam penunjukkan anggota NSWG atau Komisi, atau
 - c) Alasan bahwa seseorang tidak berhak untuk melakukannya menjadi bagian dari hasil pertemuan NSWG atau Komisi.

Lampiran E: Peta Aliran Keuangan Kamerun*



* Ini adalah reproduksi dan terjemahan dari pemetaan asli yang terdapat dalam Laporan rekonsiliasi EITI Kamerun 2005. Ini dimaksudkan untuk contoh pemetaan, namun mungkin bukan merupakan gambaran yang lengkap dan akurat dari aliran keuangan Kamerun. Laporan Kamerun tersedia di: http://www.spm.gov.cm/documents/art445_Rapport%20au%20public%20%202007.03.pdf

** Para penulis tidak berhasil membaca dan mengartikan aliran pendapatan tambahan ini dari salinan laporan yang mereka peroleh.

Lampiran F: Glosarium EITI

Administrator: Sebuah organisasi (biasanya sebuah lembaga audit atau konsultan) yang ditunjuk untuk merekonsiliasi data pembayaran dan penerimaan yang diberikan oleh perusahaan dan badan pemerintah yang terlibat dalam industri ekstraktif. Dalam sebuah rekonsiliasi, administrator membandingkan kelompok data yang berbeda-beda dan menginvestigasi dan menjelaskan perbedaan-perbedaan bila terjadi.

Aliran-aliran Penerimaan: Sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu pemerintah, perusahaan, organisasi, atau perorangan menerima dan mengumpulkan uang dari pengguna produk atau jasa mereka (bagi EITI: royalti, pajak pertambahan nilai, dll.)

Arus Keuangan: Aliran-aliran pembayaran antara perusahaan-perusahaan ekstraktif dan badan pemerintah apapun di jenjang pemerintah apapun.

Audit: Suatu proses untuk mendapatkan, memverifikasi, dan secara potensial merekonsiliasi dan melaporkan tentang laporan-laporan keuangan suatu perusahaan, pemerintah, atau entitas lainnya (dan dalam beberapa kasus, laporan terkait dengan volume produksi).

Auditor: Suatu organisasi, biasanya sebuah firma audit independen, yang memiliki lisensi atau tersertifikasi untuk melakukan audit keuangan dan jasa-jasa terkait dengan suatu standar profesional atau memberikan kewenangan bagi auditor-auditor dalam sebuah yurisdiksi legal tertentu. Dalam EITI, auditor biasanya ditugaskan dengan tanggung jawab untuk memeriksa laporan-laporan keuangan dan informasi lain yang dipegang oleh perusahaan-perusahaan dan/atau badan-badan pemerintah yang terlibat dalam industri ekstraktif dan memastikan apakah laporan-laporan dan informasi tersebut dicatat dan dilaporkan secara akurat.

Bea Ekspor/Impor: Sejenis pajak yang dikenakan pada produk ekspor atau impor. Minyak dan gas biasanya dikecualikan dari bea ekspor.

Bonus: Suatu jenis pembayaran yang dibuat kepada pemerintah pada titik tertentu yang disepakati dalam proses eksplorasi dan produksi minyak. Bonus tanda tangan dibayarkan setelah penandatanganan kontrak; bonus penemuan dibayarkan setelah penemuan minyak yang pertama; dan bonus produksi dibayarkan ketika produksi telah mencapai level tertentu.

Candidate Country, Negara Kandidat: Sebuah negara yang telah membuat komitmen secara publik untuk mengimplementasikan EITI dan telah memenuhi empat indikator validasi (penandatanganan) EITI yang pertama.

Compliant Country: Sebuah negara yang telah menerapkan EITI sepenuhnya dan telah melalui proses validasi yang berhasil sesuai dengan indikator-indikator validasi EITI.

Dewan Pengurus EITI: Badan internasional yang mengawasi EITI secara global. Dewan Pengurus terdiri atas wakil-wakil dari lembaga pemerintah yang menerapkan EITI, organisasi donor, perusahaan industri ekstraktif, investor, dan organisasi masyarakat sipil.

Disagregasi: Metode pelaporan yang dengannya setiap perusahaan dan/atau jenis-jenis pembayaran (pajak, royalti, dll.) yang diberikan kepada pemerintah dilaporkan dan masing-masing dapat diidentifikasi dalam sebuah laporan EITI.

Dividen: Suatu pembayaran kepada mitra atau pemegang saham dari keuntungan sebuah perusahaan sebagai hasil dari investasi yang dilakukan.

Industri ekstraktif: Industri yang mengekstraksi sumberdaya alam, seperti minyak, gas alam, berlian, batu bara, dan mineral lainnya dari dalam tanah.

Joint Venture: Sebuah kelompok perusahaan, yang bisa mencakup sebuah perusahaan milik negara, yang bergabung bersama untuk melakukan eksplorasi dan berprospek mengeksplorasi mineral dan hidrokarbon berdasarkan ketentuan-ketentuan dari sebuah kontrak yang disepakati.

Kelompok Kerja Lintas Pemangku Kepentingan atau Multi-stakeholder working group (MSG): Badan pembuat keputusan kunci dalam proses EITI nasional, yang memimpin dan mengawasi implementasi EITI di sebuah negara. Keanggotaan MSG harus meliputi wakil-wakil dari badan-badan pemerintah, perusahaan industri ekstraktif, dan organisasi masyarakat sipil.

Kontrak/Perjanjian Pembagian Produksi: Suatu pengaturan produksi minyak di mana di dalamnya kontraktor menanggung semua biaya eksplorasi dan produksi tanpa biaya tersebut dapat diganti bila tidak ada hasil yang ditemukan di wilayah kontrak dan di mana di dalamnya pemerintah dan kontraktor masing-masing dibayar dalam bentuk sumberdaya yang diproduksi.

Kriteria EITI: Enam kriteria yang disepakati secara internasional yang menggambarkan hasil minimum dari program EITI yang berhasil. Kriteria ini tercantum dalam *Lampiran A*.

Kutukan Sumberdaya: Sebuah istilah yang digunakan secara luas untuk menggambarkan situasi paradoks di mana negara-negara dengan kekayaan sumberdaya alam yang berlimpah adalah yang paling cenderung mengalami tingkat kemiskinan yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang rendah, dan pembangunan yang lambat.

Material/Materialitas: Sebuah ambang jumlah atau persentase yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah perusahaan atau suatu pembayaran sifatnya signifikan terhadap sebuah hasil (*outcome*), atau "secara material" mempengaruhi hasil bila dimasukkan atau tidak dimasukkan. Negara-negara yang menerapkan EITI sering menetapkan tingkat materialitas berdasarkan ukuran perusahaan atau pembayaran. Suatu level materialitas dari sebuah perusahaan akan mendefinisikan ukuran pembayaran; pembayaran lebih besar dari ini akan membuatnya harus dimasukkan dalam proses EITI. Merupakan tanggung jawab dari pemangku kepentingan untuk memutuskan bagaimana mendefinisikan tingkat materialitas.

Organisasi masyarakat sipil: Organisasi masyarakat sipil adalah organisasi non pemerintah seperti serikat pekerja, koalisi berbasis isu, organisasi berbasis keyakinan, gerakan masyarakat adat, dan yayasan-yayasan.

Pajak: Suatu pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemerintah tuan rumah menurut proporsi pendapatan kena pajak yang diperoleh dari proyek yang bersangkutan (pajak perusahaan dan pajak keuntungan adalah dua contohnya).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Suatu pajak yang dikenakan pada setiap tahap manufaktur dan penjualan dari produk atau jasa. Aturan-aturan untuk sistem PPN ditentukan di tingkat negara dan berbeda-beda antarnegara. Ekspor minyak dan gas biasanya dikecualikan dari PPN.

Pemangku Kepentingan: Anggota dari pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta yang dipengaruhi oleh industri ekstraktif di suatu negara. Wakil-wakil dari semua kelompok pemangku kepentingan harus memiliki peluang untuk berpartisipasi aktif dalam EITI.

Pembayaran *In-kind*: Pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah (misalnya, royalty) dalam bentuk komoditi aktualnya (misalnya, minyak, gas, atau mineral) dan bukannya uang.

Prinsip-Prinsip EITI: Ajaran-ajaran yang melandasi Prakarsa ini. Prinsip-prinsip ini terdapat dalam *Lampiran C*.

Rekonsiliasi: Penjelasan yang memadai tentang perbedaan antara dua angka.

Royalti: Pembayaran untuk ekstraksi sumberdaya mineral yang diberikan kepada pemerintah tuan rumah (yang bisa termasuk pemerintah regional, propinsi, dan/atau Daerah).

Sekretariat Internasional EITI: EITI didukung oleh sebuah Sekretariat Internasional yang saat ini berkedudukan di Oslo, Norwegia. Sekretariat juga merupakan penjaga metodologi EITI dan mengkoordinasikan energi bagi prakarsa global. Sebagian besar negara yang menerapkan EITI memiliki sebuah sekretariat nasional dengan staf penuh waktu untuk membantu mengelola aspek-aspek administratif dari implementasi EITI.

Standar Auditing Internasional: Standar-standar yang diterima secara internasional yang berlaku bagi auditor profesional dalam melakukan audit, sebagaimana dikeluarkan oleh Badan Audit Internasional dan Standar Jaminan. Dapat tidaknya standar-standar ini diberlakukan di masing-masing negara tergantung organisasi pembuat peraturan yang relevan di negara yang bersangkutan.

Validasi: Proses yang disepakati di mana di dalamnya progres dalam menerapkan EITI oleh negara-negara diukur dengan Kriteria EITI. Rincian tentang proses validasi dapat dilihat di:

<http://www.eiti.org/document/validationguide>

The Extractive Industries Transparency Initiatives

(EITI) adalah sebuah standar yang dikembangkan secara global yang mempromosikan transparansi pendapatan di level nasional. Ini juga merupakan koalisi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat sipil. Melalui metodologinya yang besar tapi fleksibel, pembayaran dari perusahaan dan pendapatan pemerintah dari minyak, gas dan tambangan yang dipublikasikan dan diskrepansi menjadi berkurang. Meskipun Dewan EITI dan sekretariat Internasional merupakan custodians dari proses EITI, maka implementasi akan memakan waktu di tingkatan daerah, dimana sebuah proses yang mementingkan partisipasi dari banyak stakeholders.

www.eiti.org

The National Democratic Institute for International Affairs (NDI)

adalah sebuah organisasi nirlaba yang bekerja untuk memperkuat dan menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi di seluruh dunia. Dengan menggunakan suatu jaringan global para sukarelawan atau sukarelawati yang ahli di bidangnya masing-masing, NDI menyediakan bantuan teknis praktis untuk para pemimpin masyarakat dan politik dalam memajukan nilai-nilai, praktek-praktek, dan lembaga demokratik. NDI bekerja dengan para kaum demokrat di seluruh daerah di dunia ini untuk membangun organisasi politik dan kemasyarakatan, menjaga pemilihan umum, dan untuk mempromosikan partisipasi warga negara, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

www.ndi.org

The Revenue Watch Institute (RWI)

mempromosikan pengelolaan yang bertanggung jawab untuk sumber daya minyak, gas dan mineral untuk kepentingan masyarakat banyak. Dengan pengelolaan pendapatan yang efektif, keterlibatan warga dan akuntabilitas pemerintah yang sebenarnya, kekayaan sumber daya alam dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan nasional. RWI menyediakan ekspertis/keahlian, dana dan bantuan teknis untuk membantu negara-negara dalam merealisasikan manfaat-manfaat ini.

www.revenuewatch.org

The United States Agency for International Development (USAID)

adalah lembaga utama dari pemerintah Amerika Serikat yang memberikan bantuan di luar negeri untuk negara-negara yang baru mengalami bencana alam, yang sedang mencoba keluar dari kemiskinan, dan yang sedang melakukan reformasi demokratis.

www.usaid.gov



www.eiti.org

www.ndi.org

www.revenuewatch.org

www.usaid.gov